

IKLIM ORGANISASI PENDIDIKAN TERBENTUK MELALUI MUTU



Dr. Yuyun Nuriah, M.Pd.

ISBN 978-623-198-149-3



9 786231 981493

IKLIM ORGANISASI PENDIDIKAN TERBENTUK MELALUI MUTU

**Penulis :
DR. Yuyun Nuriah, M.Pd.**



PT GLOBAL EKSEKUTIF TEKNOLOGI

**IKLIM ORGANISASI PENDIDIKAN
TERBENTUK MELALUI MUTU**

Penulis : DR. Yuyun Nuriah, M.Pd.

ISBN : 978-623-198-149-3

Editor : Ari Yanto, M.Pd.

Penyunting: Tri Putri Wahyuni, S.Pd.

Desain Sampul dan Tata Letak : Atyka Trianisa, S.Pd.

Penerbit : PT GLOBAL EKSEKUTIF TEKNOLOGI
Anggota IKAPI No. 033/SBA/2022

Redaksi :

Jl. Pasir Sebelah No. 30 RT 002 RW 001
Kelurahan Pasie Nan Tigo Kecamatan Koto Tengah
Padang Sumatera Barat
Website : www.globaleksekutifteknologi.co.id
Email : globaleksekutifteknologi@gmail.com

Cetakan pertama, Maret 2023

Hak cipta dilindungi undang-undang
Dilarang memperbanyak karya tulis ini dalam bentuk
dan dengan cara apapun tanpa izin tertulis dari penerbit.

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT, karena atas limpahan rahmat-Nya, kami dapat melaksanakan salah satu tugas dalam membuat modul landasan Pendidikan sebagai pelaksanaan tugas dan fungsi dalam mempermudah pembelajaran mahasiswa mengikuti mata kuliah landasan Pendidikan.

Beberapa kebijakan dan regulasi terkait lainnya, khususnya kebijakan dan regulasi yang terkait dengan pelaksanaan pendidikan, kami telah berhasil menyusun buku yang berjudul *“Iklim organisasi Pendidikan terbantu melalui mutu”*, yang mengulas masalah gambaran mutu, mutu dalam pendidikan, dan iklim organisasi di sekolah.

Besar harapan kami agar buku ini dapat dimanfaatkan secara optimal oleh semua pihak terkait, dan tenaga pendidik, sehingga pada akhirnya dapat menjadi bagian alternatif yang membantu mahasiswa dan perguruan tinggi dalam penyelenggaraan pendidikan. Kami menyadari bahwa dokumen yang dihasilkan ini masih terdapat banyak kekurangan. Oleh karena itu, kami sangat mengharapkan kritik dan saran dari berbagai pihak, untuk perbaikan dan penyempurnaan lebih lanjut. Kami menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya atas peran serta aktif dari berbagai pihak dalam penyusunan modul. Secara khusus diucapkan terima kasih kepada mahasiswa dan dosen yang telah membantu dalam penyusunan modul ini.

Jakarta, Januari 2023

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
Hakikat Mutu	1
Pentingnya Mutu.....	7
Keuntungan Mutu.....	12
Mutu Pendidikan.....	16
Pendidikan Bermutu.....	24
Mutu Pembelajaran.....	31
Manajemen Mutu Sekolah.....	37
Iklim Sekolah.....	45
DAFTAR PUSTAKA	61
BIODATA PENULIS	

HAKIKAT MUTU

Berbicara mengenai mutu, satu hal yang kita pahami adalah sebuah konsep yang relatif, bahkan memiliki beragam interpretasi dan kegunaan, serta banyak jenis pendefinisian (Harvey & Green, 1993, p.10; Dale, 2003, p.4). Relatifitas dalam pendefinisian mutu dapat dilihat melalui dua hal, yaitu pendefinisian mutu tergantung pada penggunaan istilah dan keadaan dimana hal tersebut dimanfaatkan. Menurut Harvey & Green (1993, p.10) hal tersebut menjelaskan bahwasanya terdapat perbedaan bagi setiap individu dalam mendefinisikan. Meskipun demikian, perlu dipahami bahwa, perberdaan pendefinisian mutu bukan merujuk pada sesuatu hal yang sama, melainkan perspektif yang berbeda pada hal yang berbeda dan label yang sama, misalnya pembahasan mutu dalam publikasi akademik dan perdagangan, media dan dalam seminar pelatihan (Harvey & Green, 1993, p.10; Reeves & Bednar, 1994; p.419). Kedua, mutu atau relativisme. Bagi beberapa sudut pandang, mutu dilihat sebagai kemutlakan, yaitu adanya kualitas tanpa kompromi atau dilihat sebagai sesuatu yang absolut, namun, dalam sudut pandang lain mutu dilihat dari ambang batas mutlak yang harus bisa dilampaui untuk mendapatkan peringkat kualitas (Harvey & Green, 1993, p.10).

Bagi sebagian orang yang akrab dengan mutu, mereka akan mengatakan bahwasanya paham mengenai apa yang dimaksudkan dengan kualitas atau mutu itu sendiri (Dale,

2003, p.4). Namun, pada kenyataannya pendefinisian kualitas sebagai sebuah konsep memiliki taraf yang cukup sulit untuk dipahami oleh banyak orang, bahkan akan tercipta banyak kebingungan serta mitos yang mengelilinginya (Dale, 2003, p.4). Merujuk pada pendefinisian mutu dalam linguistik, mutu berasal dari kata latin “*qualis*” yang artinya sebagaimana adanya, namun apabila melihat pendefinisian mutu sebagai sinonim dari pengendalian proses statistik, maka mutu dapat dijelaskan sebagai pemberatansan dan memprediksi adanya cacat atau ketidaklayakan hasil produksi (Dale, 2003, p.4; Koslowski III, 2006, p.278). Kondisi yang dijelaskan oleh Koslowski III juga berhubungan dengan penjelasan konsep manajemen mutu yang bermula dikembangkan di dunia bisnis, yaitu untuk menjaga eksistensi perusahaan dalam rangka menghadapi persaingan yang semakin ketat seiring berkembangnya zaman (Christianingsih, 2011, p.35). Apabila merujuk pada literatur manajemen, istilah mutu ini didefinisikan dalam lingkup yang cukup beragam, mulai dari keunggulan, nilai, kesesuaian suatu produk atau jasa untuk digunakan, kesesuaian dengan spesifikasi, kesesuaian dengan persyaratan, penghindaran kekurangan, hingga memenuhi dan/atau melebihi harapan pelanggan (Cheng & Tam, 1997, p.22-23). Lebih lanjut, Christianingsih (2011, p.35) meringkas penjelasan dari Willborn dan Cheng terkait *Quality Management* atau QM ke dalam beberapa poin sebagai berikut:

1. Sebuah perencanaan serta pengendalian secara sistematis terhadap mutu barang dan jasa yang ditawarkan oleh perusahaan atau organisasi;

2. Semua aktivitas yang merujuk pada fungsi manajemen secara menyeluruh, baik dalam menentukan kebijakan, sasaran, dan tanggung jawab mutu, serta bagaimana mereka melaksanakan proses perencanaan mutu tersebut;
3. Serangkaian ilmu pengetahuan yang diperoleh melalui proses yang cukup panjang, meliputi riset, praktek, dan pengalaman; dan
4. Terdapat hubungan yang erat antara manajemen mutu dengan perencanaan serta pengendalian mutu barang dan jasa.

Apabila melihat penjelasan sebelumnya, maka dapat dilihat bahwa pada awalnya istilah mutu banyak digunakan dalam bidang ekonomi, khususnya dalam organisasi industri, di mana mutu diartikan sebagai karakteristik produk/jasa yang ditentukan oleh pihak pelanggan, dan diperoleh melalui proses serta perbaikan secara berkelanjutan, hal ini tentu sangat berfungsi untuk mendukung kepercayaan pada layanan dan struktur yang dianut (Gardner & Mazza, 2012, p.154). Bahkan, mutu telah digambarkan sebagai “satu-satunya” kekuatan yang paling penting dalam menggambarkan pertumbuhan ekonomi di pasar internasional (Reeves & Bednar, 1994; p.419). Singkatnya, mutu dapat dijelaskan sebagai sejauh mana seperangkat yang melekat memiliki karakteristik dalam memenuhi kebutuhan atau harapan yang dinyatakan secara tersirat (Hoyle, 2007, p.10). Meskipun demikian, saat ini, khususnya dalam dunia bisnis tidak ada satupun definisi mutu yang dapat diterima. Alih-alih berfokus pada pendefinisian dari

mutu itu sendiri, saat ini cenderung mengacu pada efek yang akan diterima oleh masyarakat dengan mencegah segala bentuk kesalahpahaman dalam bentuk komunikasi, yakni dengan cara sebagai berikut:

- Harus memahami landasan pemilihan kata atau istilah yang jelas dan lengkap;
- Audiens yang menjadi sasaran komunikasi juga harus memiliki pemahaman mutu yang sama dengan individu yang berusaha melakukan komunikasi dua arah; dan
- Dalam satu organisasi, untuk meminimalisir munculnya kebingungan dan memastikan bahwa setiap elemen yang tergabung memiliki fokus yang sama, dan harus memiliki kesepakatan atas definisi mutu yang digunakan (Dale, 2003, p.4).

Apabila melihat dari beberapa pendefinisian mengenai mutu dari beberapa sudut pandang, maka dapat disimpulkan bahwasanya mutu merupakan istilah subyektif, sehingga setiap orang memiliki caranya sendiri untuk mendefinisikan (Evans & Lindsay, 2020, p.6). Merujuk pada salah satu penelitian yang meminta para manajer dari 86 perusahaan di Amerika Serikat dalam tulisan Evans & Lindsay (2020, p.6) secara tidak langsung kita dapat melihat adanya perbedaan pendefinisian mengenai mutu melalui sembilan sudut pandang, yaitu:

1. Kesempurnaan;
2. Konsistensi;
3. Menghilangkan limbah;
4. Kecepatan pengiriman;

5. Kepatuhan terhadap kebijakan serta prosedur yang berlaku;
6. Menyediakan produk yang baik dan juga bermanfaat;
7. Melakukan pekerjaan dengan prosedur yang tepat saat kali pertama mencoba;
8. Menyenangkan atau menenangkan pelanggan; dan
9. Total dari layanan serta kepuasan pelanggan yang diterima oleh suatu perusahaan atau organisasi.

Dengan demikian, karena tidak adanya kepastian dalam pendefinisian mutu, maka penting untuk memahami dari perspektif mana mutu dilihat, khususnya guna menghargai sepenuhnya peran yang dimainkan di berbagai organisasi atau perusahaan. Lebih lanjut, Evans & lindsay (2020, p.6) menambahkan bahwa mutu secara garis besar dapat didefinisikan melalui enam perspektif yang berbeda, yaitu 1) transenden; 2) produk; 3) nilai; 4) pengguna; 5) manufaktur; dan 5) pelanggan. Begitu pula dengan mutu pendidikan, beberapa mungkin melihat mutu pendidikan sebagai kualitas proses dan hasil, baik merujuk pada input, potses, hasil, atau satu kesatuan dari semua aspek tersebut kemudian dihubungkan dengan kesesuaian penggunaan, kepuasan kebutuhan konstituen strategis, atau kesesuaian dengan persyaratan serta harapan konstituen strategis (Cheng & Tam, 1997, p.23). Dalam ranah pendidikan, terdapat satu istilah yang saat ini terkenal dikalangan para ahli pendidikan, yaitu “model nilai tambah atau *value added modeling*), model ini dimanfaatkan untuk mengukur pentingnya kualitas guru dalam memproduksi pendidikan, selain itu model ini juga dapat

digunakan untuk menilai persiapan guru dan program sertifikasi, serta sebagai masukan penting untuk melakukan evaluasi setiap personel yang berkontribusi dan program prestasi (Rothstein, 2010, p.2).

PENTINGNYA MUTU

Terjadinya revolusi mutu merupakan faktor utama yang melandasi kebangkitan Jepang sebagai negara adidaya ekonomi. Begitupula dengan negara Amerika yang telah mengespor jutaan kesempatan kerja dengan neraca perdagangannya yang dinilai timpang, pada akhirnya terpaksa harus melawan revolusi mutu. Berdasarkan dua penjelasan singkat tersebut, secara tidak langsung dapat dipahami bahwasanya dengan meningkatkan mutu akan menyelamatkan perusahaan dari persaingan dunia yang semakin ketat. Meskipun pengimplikasian mutu bagi setiap individu, kelompok, maupun organisasi berbeda, tidak dapat dipungkiri juga bahwa mereka juga menyetujui terhadap upaya peningkatan mutu itu sendiri (Sallis, 2005, p.50). Sallis (2005, p.51) menjelaskan bahwa mutu merupakan salah satu ide yang dinamis, sedangkan definisi yang dikemukakan oleh beberapa ahli cenderung kaku, bahkan bisa dibilang tidak memiliki manfaat yang konkrit. Hal tersebut berhubungan dengan beberapa perbedaan dan konsekuensi praktis yang signifikan dari setiap pendefinisian, oleh karenanya mutu sebaiknya dijelaskan sebagai ide yang bersifat netral, yang memiliki arus tenang dan terus bergerak ke arah yang positif serta dinamis.

Peningkatan mutu oleh sebagian besar perusahaan dimulai sejak tahun 1980-an, hal ini dibuktikan oleh sebagian besar perusahaan yang mengambil inisiatif untuk meningkatkan mutu. Namun, tetap saja dari sudut pandang

lainnya muncul perdebatan mengenai mutu, bahkan sampai melibatkan permasalahan mengenai bagaimana mendefinisikan mutu, bagaimana pengukurannya, hingga bagaimana cara untuk menghubungkannya dengan laba. Perdebatan tersebut sebagian besar berasal dari perusahaan jasa yang cenderung menghadapi cukup banyak permasalahan, khususnya pada perusahaan manufaktur. Apabila seluruh produk dari perusahaan manufaktur gagal berfungsi atau tidak memuaskan pelanggan, biasanya pelanggan akan berusaha untuk mengembalikan produk atau meminta pertanggung jawaban perusahaan untuk memperbaiki kerusakan maupun kekurangan dari pesanan tersebut.

Oleh karenanya, di berbagai perusahaan sudah menerapkan sistem garansi untuk setiap produk yang dihasilkan. Sehingga, apabila terdapat kegagalan dalam suatu produk dan hal tersebut merupakan kesalahan dari pihak perusahaan jasa dan pelanggan tidak memanfaatkan fitur tersebut, maka tidak dapat dikembalikan. Namun, terdapat konsekuensi terkait hal tersebut, yakni adanya reaksi pelanggan, salah satunya berhenti menggunakan jasa dari organisasi tersebut. Permasalahan mutu jasa layanan sejenis ini, biasanya berhubungan dengan konsep mutu layanan dalam bidang pendidikan. Bagi beberapa lembaga pendidikan yang kurang peminat (kekurangan peserta didik) karena mutu yang ditawarkan tidak memuaskan. Begitupun sebaliknya, bagi lembaga pendidikan yang tinggi peminat, artinya produknya memuaskan, baik bagi orang tua maupun peserta didik.

Pentingnya mutu dalam bidang pendidikan, secara khusus perlu memahami apa yang dimaksud dengan produk

pendidikan. Mengapa demikian? Karena produk pada dasarnya adalah subyek dari proses penjaminan mutu, maka hal yang paling utama dan pertama yang harus dilakukan oleh produsen adalah menentukan dan mengontrol sumber persediaan, kemudian bahan mentah harus melewati berbagai jenis tahapan proses, sehingga dapat mencapai proses standar yang telah diterapkan, serta hasil produksi dapat memenuhi spesifikasi yang telah ditetapkan dan didefinisikan sebelumnya. Kedua model tersebut perlu diterapkan meskipun prosesnya tidak akan mudah. Namun, hal tersebut tentu akan sepadan dengan *output* yang diharapkan, yaitu menghasilkan pelajar dengan standar jaminan yang bermutu (Sallis, 2005, p.62).

Pendidikan yang dilaksanakan di sekolah merupakan suatu proses pembelajaran bagi peserta didik yang saling berkesinambungan, yang mana hal tersebut bermuara pada tujuan guna menghasilkan *output* yang bermutu, oleh karenanya, untuk menghasilkan mutu tersebut, proses pembelajaran harus sesuai dengan kebutuhan atau tuntutan lapangan, sehingga ruang lingkup materi yang akan didistribusikan kepada peserta didik juga harus dipelajari dengan baik dan terarah, serta memiliki relevansi yang tinggi. Dengan begitu, lulusan atau *output* dari sekolah tersebut akan mampu beradaptasi dengan mudah di dunia kerja atau lingkungan masyarakat secara umum.

Merujuk pada penjelasan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 053/u/2001 dapat diketahui bahwa setiap lembaga penyelenggaraan pendidikan cenderung dituntut untuk senantiasa melaksanakan manajemen

peningkatan mutu berbasis sekolah. Hal tersebut merujuk pada penjelasan pendidikan bermutu merupakan pendidikan yang mampu melewati proses pematangan kualitas peserta didik, pematangan ini tentu dilakukan dengan cara pengembangan pengetahuan untuk membebaskan peserta didik dari ketidaktahuan, ketidakmampuan, ketidakberdayaan, ketidakbenaran, ketidakjujuran, sehingga dapat menciptakan peserta didik yang beriman dan berakhlak (Mulyasana, 2011, p.120). Lembaga pendidikan yang mementingkan mutu dalam prosesnya, maka akan cenderung memperhatikan perencanaan, materi dan sistem tata kelola, serta komponen utama pendidikan yang bermutu (guru). Hal tersebut tentu didukung dengan pengembangan dari 1) materi pelajaran yang diperoleh para peserta didik; 2) perencanaan pendidikan yang direncanakan sedemikian rupa, namun tidak hanya dimaksudkan untuk mencetak maupun mempersiapkan masa depan peserta didik agar dapat bersaing di masa yang akan datang, tetapi juga mempersiapkan dan membekali ilmu tentang kehidupan setelah dunia; 3) memperhatikan tata kelola pendidikan yang baik, hal ini berhubungan dengan prinsip yang bersifat komprehensif, saling berhubungan dan berkesinambungan antara satu aspek dengan aspek lainnya; dan 4) pendidikan yang bermutu lahir dari guru yang bermutu pula. Dengan mengedepankan mutu, maka lembaga pendidikan umumnya akan memperhatikan beberapa hal berikut, antara lain:

1. Guru yang bukan hanya guru yang sekedar memiliki pengetahuan luas atau pintar, tetapi juga guru yang

- mampu membagikan ilmu pengetahuan yang dimilikinya dengan baik kepada peserta didik;
2. Guru yang baik bukan hanya sekedar guru yang berkarakter, tetapi seorang guru yang mampu membentuk karakter yang baik bagi para peserta didiknya pula;
 3. Seorang guru hendaknya tidak hanya memiliki perilaku yang baik, sehingga bisa menjadi teladan dan integritas, tetapi guru juga harus mampu menjadikan peserta didik memiliki teladan serta patut diteladani oleh sesama; dan
 4. Guru dapat memahami bahwasanya tugas utamanya bukanlah sebagai pelayan dalam belajar yang baik, melainkan seorang guru yang mampu menyampaikan arti dari sejumlah konsep serta membantu peserta didik ketika mengalami kesulitan belajar (Mulyasana, 2011, p.123).

KEUNTUNGAN MUTU

Bagi sebagian pihak, untuk mencapai mutu yang diinginkan dalam suatu produk adalah proses yang cukup sulit bahkan dinilai sebagai pemborosan. Meskipun demikian, membuat produk yang bermutu, maka akan mendatangkan manfaat maupun keuntungan yang besar bagi perusahaan. Terjadinya peningkatan terhadap mutu (baik dalam proses maupun hasil akhir produk) akan meminimalisir modal produksi, karena adanya biaya tambahan untuk perihal pengembangan material dan penundaan kerja guna memaksimalkan produk yang akan dipasarkan. Sehingga akan berdampak juga pada produktivitas, peningkatan pangsa pasar, keberlangsungan organisasi, serta berbagai dampak positif lainnya. Begitupula pada bidang pendidikan. Semakin meningkatnya mutu pembelajaran dalam suatu lembaga pendidikan, maka akan semakin sedikit peluang bagi peserta didik akan gagal dalam proses pendidikannya, bahkan peluang mereka untuk tidak mengulang kembali pada kelas yang sama akan lebih besar pula. Pada akhirnya, hal tersebut akan menghemat biaya serta waktu, atau dapat dikatakan juga bahwa dengan meningkatkan mutu maka akan memberikan dampak positif pada sistem organisasi secara keseluruhan.

Apabila merujuk merujuk penjelasan W. Edward Deming yang dikemukakan pada tahun 1938, mutu pendidikan dapat dijelaskan dalam suatu reaksi. Reaksi ini diperkenalkan oleh Deming dengan istilah reaksi rantai, yakni kondisi ketika

perusahaan harus dapat meningkatkan kualitas produk, khususnya apda saat perusahaan berusaha mengembangkan kualitas dari produk dengan merancang reduksi biaya, sehingga dapat meningkatkan produktivitas dan meningkatkan daya saing dengan kualitas yang lebih baik (Sonia, 2021, p.3). Dalam penjelasan reaksi rantai Deming juga menunjukkan adanya penjelasan bahwa dengan meningkatkan kualitas maka akan berdampak pada penurunan biaya yang harus dikeluarkan, namun dibalik itu produktivitas suatu perusahaan akan meningkat, bahkan kemampuan organisasi dalam meraih pasar dengan mutu yang lebih baik serta biaya yang lebih rendah juga akan meningkat. Pada akhirnya, kemampuan yang dimiliki oleh organisasi untuk tetap berkecimpung di dalam jalur bisnis serta kemampuan organisasi dalam menyediakan lapangan pekerjaan juga lebih baik.

Deming (dalam Sonia, 2021, p.6) menjelaskan bahwa mutu merupakan segala sesuatu yang diklasifikasikan sebagai kebutuhan dan keinginan konsumen. Bagaimanapun, mutu yang unggul akan terus menjadi kunci utama sukses bagi perusahaan maupun lembaga yang berjuang untuk mengembangkan kualitas jasa dan barang dalam persaingan mereka. Oleh sebab itu, penting bagi para lembaga maupun perusahaan untuk memastikan praktik yang baik, dari pinsip manajemen mutu (Narasimhan & Schoenherr, 2012, p.1158). Peningkatan mutu pada akhirnya akan menjadi prioritas, terlebih lagi ketika menyadari bahwa dengan meningkatkan mutu akan membuat produk atau jasa yang dihasilkan oleh organisasi akan mengalami peningkatan karena memiliki reputasi mutu yang baik. Bahkan, dengan meningkatkan mutu

maka produk maupun jasa yang ditawarkan akan memberikan dampak meningkatnya laju pangsa pasar, kemudian dapat meningkatkan volume dan terjadi efisiensi, hingga tercapainya keuntungan secara otomatis.

Meskipun demikian, permintaan dan tuntutan yang berasal dari konsumen tetap harus menjadi perhatian utama, karena semakin meningkat permintaan terhadap produk dan jasa layanan, maka akan semakin tinggi ekspektasi para konsumen terhadap mutu yang ditawarkan. Sejalan dengan hal tersebut, maka mutu produk dan jasa layanan yang diberikan juga harus terus berkembang dan ditingkatkan. Umam (2020, p.71) menambahkan bahwa dengan meningkatkan mutu, maka akan lembaga atau organisasi tersebut akan memperoleh banyak keuntungan. Lebih lanjut, Mitra (dalam Umam, 2020, p.71) melengkapi keuntungan apabila lembaga atau organisasi memperhatikan mutu yang dimiliki, antara lain:

1. Meningkatnya kualitas produk dan layanan;
2. Adanya perkembangan dan pembaharuan dari sistem, karena terus melalui proses evaluasi, kemudian dimodifikasi untuk memenuhi kebutuhan pelanggan;
3. Sistem kendali mutu juga dapat meningkatkan produktivitas, hal ini tentu menjadi sorotan karena produktivitas sendiri adalah tujuan dari setiap organisasi atau lembaga;
4. Akan meminimalisir biaya produksi dan lainnya, terlebih untuk jangka panjang; dan
5. Waktu tunggu komponen produksi dan subassemblies akan berkurang dengan adanya peningkatan produktivitas,

artinya lembaga atau organisasi akan menghasilkan kualitas pengiriman yang lebih baik.

MUTU PENDIDIKAN

Ketika membahas atau mendefinisikan mutu, khususnya pendefinisian mengenai mutu pendidikan yang berkaitan erat dengan paradigma “manajemen mutu”, dimana efektivitas kelembagaan umumnya telah menjadi sinonim dalam pembahasan mutu pendidikan (Barrett, A., et al, 2006). Kehadiran manajemen yang efektif dalam organisasi pendidikan dewasa ini semakin banyak memperoleh pengakuan dari berbagai pihak. Sosialisasi mengenai manajemen pendidikan telah dicanangkan di beberapa negara di dunia, seperti Amerika Serikat, Australia, Hong Kong, Inggris, Israel, dan Selandia Baru telah meningkatkan kebutuhan mereka terhadap manajemen pendidikan yang dinilai efektif (Bush & Coleman, 2012). Hal tersebut berkaitan dengan pendefinisian yang luas mengenai “pendidikan”. Hirst dan Peters (1970, p.19 dalam Barrett, A., et al, 2006) menjelaskan bahwa pendidikan direpresentasikan sebagai pengembangan mutu yang diinginkan oleh sebagian besar individu. Tentu kesepakatan saja tidak cukup untuk melandasi “mutu yang diinginkan” serta apa itu dan beberapa posisi yang akan diadopsi dalam prosesnya. Oleh karenanya, poin penting dalam melihat mutu pendidikan adalah memahami tentang tujuan dari pendidikan sebagai prasyarat dalam mempertimbangkan mutu secara terperinci.

Sebenarnya, makna sesungguhnya dalam kualitas pendidikan tidak secara gamblang dijelaskan, bahkan seringkali hal tersebut tidak dapat dijelaskan dengan baik.

Namun, seiring berjalannya waktu dan melalui proses yang cukup panjang, konteks mutu pendidikan tampaknya mengacu pada beberapa hal, seperti:

1. Masukan, meliputi jumlah guru, jumlah pelatihan guru, dan jumlah buku pelajaran;
2. Proses, meliputi jumlah waktu pembelajaran yang berlangsung dan tingkat pembelajaran yang efektif;
3. Keluaran, meliputi nilai tes dan tingkat kelulusan setiap angkatan; dan
4. Hasil dari kinerja dalam pekerjaan selanjutnya (Chapman & Adams, 2002, p.2).

Berdasarkan penjelasan singkat tersebut, mutu dalam ranah pendidikan dapat dijelaskan sebagai keseluruhan karakter dari barang atau jasa yang berhubungan dengan pemenuhan kebutuhan pelanggan (dalam hal ini adalah siswa dan orang tua murid). Hal ini tentu meliputi beberapa hal, yaitu input, proses, dan output. Input pendidikan merupakan segala sesuatu yang harus ada, karena hal input merupakan sebuah kebutuhan untuk keberlangsungan proses pengembangan mutu. Adapun yang dimaksud disini adalah sumber daya perangkat lunak, dan harapan sebagai pemandu selama proses tersebut berlangsung.

- Input sumber daya yang dimaksudkan meliputi sumber daya manusia, seperti kepala sekolah, guru, konselor, karyawan, dan juga peserta didik dan sumber daya lainnya (misalnya peralatan, perlengkapan, uang, hingga bahan yang dapat dimanfaatkan dalam proses pengembangan mutu);

- Input perangkat umumnya meliputi struktur organisasi sekolah, peraturan perundang-undangan sebagai landasan berjalannya suatu organisasi, deskripsi mengenai tugas, rencana, dan program; dan
- Input harapan merujuk pada visi, misi, tujuan, dan sasaran yang ingin diraih dan/atau dicapai oleh pihak sekolah.

Ketiga input yang dijelaskan sebelumnya harus dipersiapkan sebaik mungkin, karena *input* memiliki peran yang sangat penting agar proses dapat berjalan dengan baik. Tinggi rendahnya mutu, dapat diukur melalui tingkat kesiapan *input* itu sendiri. Oleh karenanya, semakin tinggi kesiapan *input*, maka semakin tinggi juga mutu. Apabila merujuk pada pendidikan berskala mikro atau rendah (pada tingkat sekolah), yang dimaksud dengan proses pendidikan adalah pengambilan keputusan, pengelolaan kelembagaan, proses pengelolaan program, proses belajar mengajar, dan proses monitoring serta evaluasi, namun proses ini tentu harus dilandasi dengan catatan bahwa proses belajar mengajar memiliki tingkat kepentingan tertinggi dibandingkan dengan proses yang lain.

Proses yang akan diklasifikasikan sebagai mutu tinggi apabila proses pengkoordinasian, penyerasian, dan pengarahan terhadap *input* sumber daya sekolah (meliputi guru, siswa, kurikulum, perlengkapan, dan lainnya) telah dijalankan dengan baik, sehingga dapat menciptakan situasi dan kondisi proses belajar belajar yang menyenangkan, tidak berhenti sampai disana, hal tersebut juga akan dinilai memiliki mutu yang tinggi apabila dapat mendorong inovasi dan motivasi belajar siswa, hingga menghasilkan keluaran yang baik. Guna menghasilkan

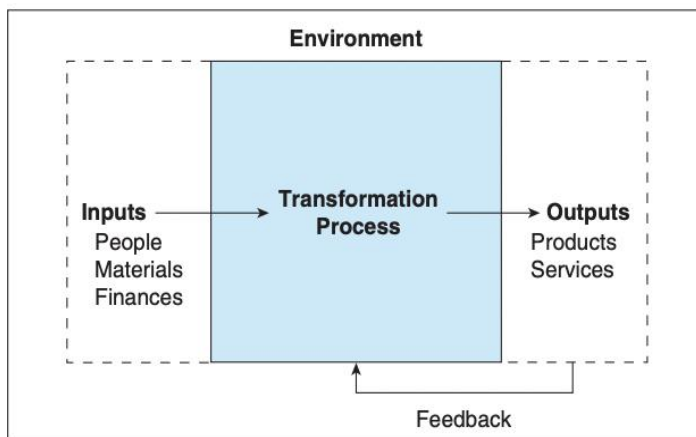
keluaran yang baik, maka guru, kepala sekolah, dan para tenaga pendidik lainnya harus bisa memberdayakan peserta didik dengan baik, adapun pemberdayaan yang dimaksud adalah memberikan ilmu pengetahuan diluar materi pokok, meliputi muatan nurani peserta didik yang kemudian dihayati dan diamalkan dalam kehidupan sehari-hari, sehingga peserta didik mampu belajar serta menghmbangkan dirinya. Terdapat tiga dimensi yang dapat mengukur mutu, yaitu efektivitas, efisiensi, dan adaptabilitas.

Dalam melihat sebuah proses pembentukan mutu pendidikan, tidak cukup apabila hanya merujuk pada *input*, karena proses tersebut akan dikatakan lebih efektif apabila *output* yang dihasilkan sesuai dengan keinginan konsumen, bahkan pengeluaran biaya minimal juga menjadi salah satu pertimbangan efektifnya sebuah proses. Selanjutnya, proses diktakan dapat beradaptasi apabila proses tersebut tetap efektif dan efisien, meskipun situasi dan kondisi selalu berubah-ubah. Perspektif *open-systems* memiliki kemungkinan dapat menjadi landasan pemahaman mengenai situasi dan kondisi yang selalu berubah-ubah, karena perspektif ini dinilai dapat menjadi reaksi terhadap asumsi atau argumentasi yang tidak realistis mengenai perilaku organisasi dapat diisolasi dari kekuatan eksternal. Mengapa demikian? Karena persaingan, sumber daya, dan tekanan politik umumnya lah yang dapat mempengaruhi kinerja internal organisasi.

Oleh karenanya, pada perspektif ini memandang organisasi tidak hanya mempengaruhi lingkungannya, tetapi juga bergantung kepadanya. Morganisasi akan masuk dari lingkungan, kemudian melihat peluang untuk memperbaikinya

ke arah yang lebih baik, setelah itu akan menghasilkan keluaran. Seperti halnya yang dijelaskan oleh Hoy, Miskel, & Tarter (2008, p.19) dalam diagram sebagai berikut:

Diagram Perspektif *Open-system*



Sumber : Hoy, Miskel, & Tarter (2008, p.19).

Mencermati alur dari diagram yang dirancang secara khusus oleh Hoy, Miskel, & Tarter dalam bukunya, dapat dilihat bahwasanya, sekolah dalam pembahasan ini merupakan sistem sosial yang membutuhkan sumber daya, seperti tenaga kerja (meliputi kepala sekolah, guru, tenaga pendidik, tata usaha, dan lain sebagainya), siswa, dan biaya materil dari lingkungan, yang mana kebutuhan akan sumber daya ini akan mengarahkan kepada *input* ke proses transformasi pendidikan, tentunya untuk menghasilkan siswa dan lulusan terpelajar dan berpendidikan. Apabila merujuk secara khusus pada mutu sekolah di negara Indonesia, menelaah kebijakan pemerintah

merupakan salah satu bentuk langkah yang efisien dalam melihat perkembangan mutu sekolah yang diketahui dalam beberapa tahun terakhir telah mengalami berbagai jenis krisis. Meskipun pada kenyataannya krisis ekonomi maupun politik yang melibatkan aspek pendidikan tidak mendapat perhatian penuh.

Hal tersebut telah terjadi sejak tahun 1996, yaitu setelah dicanangkannya KPPT jangka panjang pada tahun 1996-2005 oleh pemerintah. Namun, kemudian pada awal tahun 2000 direktorat jenderal pendidikan tinggi mensosialisasikan tiga kebijakan penting dalam bidang pendidikan, yaitu 1) peningkatan mutu berkelanjutan; 2) otonomi perguruan tinggi; dan 3) badan akreditasi nasional atau BAN. penjelasan tersebut juga dapat ditelaah lebih lanjut melalui Ketetapan MPR (masa bakti 1999-2004 pasal 80-81, bahwa para wakil rakyat yang menjabat di MPR, sudah merancang suatu pembaharuan pendidikan dengan tiga kebijakan dasar, adapun kebijakan tersebut meliputi 1) mutu dan pemerataan; 2) pemberdayaan lembaga pendidikan (dikhhususkan bagi para guru dan dosen); dan 3) penyesuaian program pendidikan sesuai dengan kebutuhan lokal maupun nasional.

Apabila kita ingin menghasilam *output* yang memuaskan, maka indeks pembangunan manusia sebagai bentuk masukan dalam pengembangan mutu pendidikan di Indonesia perlu ditingkatkan pula. Menurut penjelasan Aziz (2015) permasalahan mengenai mutu pendidikan tidak berdiri sendiri, tetapi berhubungan dengan suatu sistem yang saling berkaitan, mengapa? Karena mutu *output* akan dipengaruhi oleh mutu *input* dan proses. Proses yang dimaksudkan dalam

hal ini dapat merujuk pada perkembangan lulusan atau siswa, yaitu 1) bisa menyelesaikan studi dengan tingkat penguasaan yang tinggi, atau dapat dikatakan bahwa siswa dapat menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi sebagaimana telah ditetapkan menjadi tujuan dalam pendidikan selama 9 tahun; 2) siswa memperoleh kepuasan atas hasil pendidikannya karena penyampaian ilmu oleh guru sesuai dengan perkembangan teknologi dan juga ilmu pengetahuan yang diampu; 3) siswa dituntun agar mampu menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi untuk menunjang kehidupan pasca sekolah; dan 4) pada akhirnya siswa akan memiliki peluang kerja sesuai dengan harapan dan tuntutan di dunia nyata (Herawan, 2011).

Sejalan dengan penjelasan tersebut, maka terdapat poin yang menjadi kunci dalam peningkatan mutu sekolah, yaitu kinerja para guru. Pasalnya, pendidikan yang bermutu bukan hanya pendidikan yang sekedar mengembangkan intelegensi akademik, melainkan pendidikan yang berusaha dalam mengembangkan seluruh spektrum intelegensi manusia yang meliputi berbagai jenis aspek. Pendidikan formal dalam hal ini bukan hanya persoalan pengembangan intelegensi skolastik tetapi juga mengembangkan intelegensi emosial, spatsial, *interpersonal* dan *intrapersonal*, dan lainnya. Selain itu, mutu pendidikan juga mengacu pada upaya organisasi sekolah dalam merespon kemampuan siswa, salah satunya dengan memenuhi hak peserta didik, kesejahteraan tenaga pendidik, hingga kepuasan para orang tua murid (Jamali, 2016). Oleh karenanya, perencanaan mutu pendidikan perlu disiapkan dengan matang, sebagai bagian dari proses intelektual yang berkesinambungan,

mulai dari cara menganalisis, merumuskan, dan menimbang keputusan dengan konsisten. Dengan begitu, mutu pendidikan dapat dilihat melalui sisi perencanaan, proses, dan lulusan atau keluaran yang dihasilkan.

PENDIDIKAN BERMUTU

Merujuk pada sistem pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 1, diketahui bahwasanya pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Selaras dengan penjelasan di dalam undang-undang tersebut, dapat dijelaskan bahwa pendidikan adalah sebuah upaya yang terorganisir, berencana, dan berlangsung secara kontinu untuk membina dan/atau memberikan arahan terhadap peserta didik agar tumbuh dan berkembang menjadi insan paripurna, dewasa, dan berbudaya. Terorganisir disini memiliki makna bahwa pendidikan sudah seharusnya dilakukan dengan usaha sadar seorang individu serta dilandasi oleh dasar dan tujuan yang jelas, ada proses dan komitmen yang dibangun bersama. Sedangkan dalam konteks berencana, merujuk pada suatu perencanaan matang terkait jalannya pendidikan yang disertai perhitungan dan berbagai sistem pendukung yang sudah disiapkan sebelumnya, serta berlangsung secara kontinu artinya pendidikan akan berlangsung sepanjang manusia hidup dan bertumbuh di dunia ini (Sauri, 2016).

Mutu pendidikan merupakan salah satu aspek penting yang harus diperhatikan saat ini. Terlebih lagi, dewasa ini perkembangan ilmu teknologi dan pengetahuan telah berkembang sangat pesat, sehingga perlu penanganan yang ekstra untuk mengimbangnya. Belum lagi perubahan terjadi sangat cepat dan bersifat global. Bahkan, sejumlah informasi hampir mengisi seluruh aspek kehidupan dari berbagai macam sisi, sehingga dapat terbuka, diakses, disaksikan oleh seluruh lini masyarakat secara bebas dan tidak terbatas waktu. Oleh karenanya, diperlukan manusia-manusia unggul, bermoral, dan pekerja keras sebagai agar mampu berkompetisi dan bersaing di era ini. Namun, pada kenyataannya sebagian besar hanya memperhatikan lulusan yang bermutu tanpa menghiraukan proses pendidikan yang bermutu pula. Selaras dengan kondisi tersebut, maka perlu adanya upaya lebih keras dalam meningkatkan mutu pendidikan, sehingga diperlukan guru yang profesional juga.

Dalam melihat sebuah mutu, Sallis (2005, p.1) menjelaskan bahwa mutu memiliki posisi di puncak pada sebagian besar agenda dan meningkatkan mutu merupakan salah satu tugas yang sangat penting serta harus dihadapi oleh lembaga manapun. Kemudian, apabila merujuk pada landasan yuridis pada Undang-Undang Dasar 1945 alenia ke empat yang menyatakan “kemudian dari pada itu, untuk membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia, yang melindungi segenap bangsa, seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa”. Maka dapat disimpulkan bahwa salah satu tujuan pembangunan nasional, khususnya di negara Indonesia adalah

mencerdaskan kehidupan bangsa melalui pembangunan sektor pendidikan. Selaras dengan hal tersebut, maka untuk menciptakan pendidikan yang bermutu maka diperlukan peran guru untuk membentuk sumber daya manusia yang berkualitas dan berakhlak mulia. Guru sebagai seorang pendidik memiliki beban penting dalam membina sikap mental yang meliputi berbagai jenis aspek.

Pendidikan yang bermutu merupakan harapan dan tuntutan seluruh *stakeholder* pendidikan. Untuk mencapai mutu yang diharapkan maka, maka akan ada usaha yang harus diupayakan. Pendidikan bermutu merupakan pendidikan yang mampu melakukan proses pematangan kualitas peserta didik. Adapun pematangan ini dilakukan dengan beberapa tahapan, yaitu membimbing peserta didik untuk keluar dari ketidaktahuan, ketidakmampuan, ketidkaberdayaan, ketidakbenaran, ketidakjujuran, dan dari butuknya akhlak serta iman (Mulyasana, 2011, p.119). Lebih lanjut, Mulyasana (2011, p.119) menjelaskan bahwa pendidikan bermutu lahir dari sistem perencanaan yang baik (*good planning system*). Dengan begitu, setiap aktor yang berkontribusi di dalamnya perlu mempersiapkan materi dan sistem tata kelola yang baik pula atau *good governance system*. Selanjutnya, guru sebagai aktor yang memiliki peran penting dalam pendidikan harus dapat menyampaikannya dengan baik.

Langkah paling mendasar untuk menciptakan pendidikan bermutu adalah dengan membuat materi yang baik. Apa sebenarnya yang dimaksud dengan materi yang baik? Yaitu materi yang dirancang sedemikian rupa agar para peserta didik dapat merasakan manfaat baik ketika duduk di bangku sekolah

maupun di masa yang akan datang. Materi pembelajaran sudah seharusnya berisikan wawasan yang dapat menciptakan perubahan secara kontinum. Selain itu, materi tersebut harus dapat memberikan pengalaman yang berharga bagi setiap peserta didik, yakni meliputi motivasi, kreativitas berpikir, sehingga dapat menumbuhkan semangat. Selaras dengan penjelasan sebelumnya, materi pelajaran hendaknya juga disertai hal-hal yang mampu mengubah pola pikir, sikap, dan perilaku ke arah yang lebih baik, sehingga dapat membentuk watak kepribadian peserta didik yang terampil dan tentunya dengan jati diri yang matang.

Selanjutnya, melakukan perencanaan pendidikan dengan koheren dan teliti. Perencanaan pendidikan ini tidak hanya ditujukan untuk mencetak dan mempersiapkan masa depan peserta didik agar dapat hidup dengan baik di zaman yang akan datang. Tetapi, perencanaan pendidikan juga harus dipersiapkan agar peserta didik memiliki nilai religius yang baik pula. Hal ini tentu sejalan dengan tujuan dari pendidikan nasional dalam bertanggung jawab untuk membentuk individu yang beriman dan bertakwa, berakhlak mulia, dan cerdas. Oleh karenanya, dapat disimpulkan bahwasanya pendidikan yang baik adalah pendidikan yang tidak mati ketika manusia atau seorang individu, tetapi akan tetap hidup dan mendampingi manusia sampai kapanpun.

Tidak sampai disana, pendidikan yang bermutu juga memerlukan tata kelola pendidikan yang baik. Adapun yang dimaksud dengan sistem tata kelola yang baik adalah sistem dengan prinsip yang bersifat koheren, saling berhubungan, dan

berkesinambungan antara satu prinsip dengan prinsip lainnya. Lebih lanjut, Mulyasana (2011) menjelaskan secara terperinci mengenai sistem tata kelola yang baik, sebagai berikut:

- Tata kelola komprehensif, yakni sistem tata kelola yang memiliki sifat utuh serta menyeluruh di setiap pembangunan pendidikan. Atau dapat dijelaskan juga bahwasanya pembangunan pendidikan bukan hanya sekedar meningkatkan anggaran, tetapi juga perlu memperhatikan aspek lainnya yang saling berkaitan, seperti kualitas guru, budaya belajar mengajar, sarana dan prasarana belajar, manajemen pendidikan, kebijakan dan program, dan produk serta daya dukung lingkungan;
- Sistem tata kelola pendidikan harus memperhatikan hubungan antar fungsi dan peran komponen satu dengan lainnya. Penjelasan mengenai sistem ini dapat dianalogikan sebagai berikut, apabila tujuan dari pendidikan adalah mencetak peserta didik yang cerdas, maka pimpinan lembaga pendidikan harus cermat dalam menghitung berapa jumlah peserta didik yang akan dicetak. Selaras dengan hal tersebut, maka seorang pemimpin harus menyiapkan berbagai aspek (meliputi, sarana dan prasarana belajar mengajar, sistem kepemimpinan dan manajemen pendidikan) untuk mendukung proses belajar mengajar yang mampu merangsang terciptanya peserta didik yang cerdas;
- Sistem tata kelola yang baik dan bersifat terukur. Artinya, sekecil apapun anggaran yang dikeluarkan oleh orang tua peserta didik harus melahirkan produk pendidikan pula;

- Sisem tata kelola yang berkesinambungan merupakan tata kelola yang memperhatikan prinsip keseimbangan antara kekuatan satu komponen dengan komponen lainnya. Atau dapat dijelaskan juga bahwa setiap komponen yang diperlukan dalam sistem pendidikan harus memiliki kekuatan yang sama dan berkembang secara merata dan seimbang.

Selaras dengan penjelasan tersebut, maka upaya yang harus ditempu oleh organisasi pendidikan bukan sekedar mencetak lulusan atau peserta didik yang cerdas, tetapi juga mampu menciptakan tenaga kerja yang dapat mengoptimalkan keterampilan dan kemampuan berpikir dalam menjalankan tugas yang diemban. Oleh karenanya, untuk mewujudkan hal tersebut, berarti guru sebagai aspek penting dalam organisasi pendidikan harus mampu mempersiapkan seluruh peserta didik agar memiliki berbagai kemampuan, meliputi kemampuan pemecahan masalah, menemukan, menganalisis, mensistensis informasi, dan kemampuan peserta didik dalam berdiskusi untuk mencari solusi atas suatu permasalahan (Gay, 2016, p.261).

Singkatnya, pendidikan bermutu lahir dari guru yang bermutu pula. Hal paling mendasar yang perlu dimiliki oleh seorang guru adalah menguasai materi ajar, lebih dari itu seorang guru dapat dikatakan bermutu apabila dapat menguasai metodologi, sistem evaluasi, dan psikologi belajar (Mulyasana, 2011, p.122). Metodologi yang dimaksudkan dalam pendidikan bermutu merujuk pada keanekaragaman peserta didik maka seorang guru harus mampu menempatkan

perbagai substansi, baik dari perbedaan pengalaman belajar, perbedaan bahasa dan budaya dalam suatu organisasi pendidikan, gara belajar, talenta, hingga intelegensi sebagai landasan dalam melakukan berbagai jenis strategi mengajar yang dipilih (Gay, 2016, p.261).

MUTU PEMBELAJARAN

Berbicara mengenai mutu pembelajaran, artinya membahas mutu layanan yang disediakan oleh organisasi pendidikan dalam proses belajar mengajar, dimana hal tersebut merupakan seperangkat interaksi dari keseluruhan komponen pembelajaran. Adapun komponen pembelajaran yang dimaksud adalah tenaga pendidik, guru, gasilitas belajar, tujuan dari pembelajaran, materi belajar, dan peserta didik (Rifandi, 2013, p.128). Selaras dengan penjelasan tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa mutu pembelajaran merupakan hierarki paling unggul dalam sistem pendidikan yang secara efektif dan efisien dapat melahirkan mutu baik dalam bidang akademis maupun ekstra kulikuler pada peserta didik yang dinyatakan lulus pada satu jenjang pendidikan atau menyelesaikan studi pembelajaran tertentu.

Upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan mutu pembelajaran meliputi peningkatan aktivitas serta kreatifitas pembelajaran, baik dilakukan oleh guru maupun peserta didik, selain itu peningkatan disiplin belajar siswa dalam rangka peningkatan pengawasan dan motivasi belajar juga perlu dicanangkan. Berdasarkan hal tersebut, maka proses pembelajaran sebenarnya ditujukan untuk mengembangkan aktivitas dan kreativitas peserta didik, yaitu melalui berbagai interaksi dan pengalaman belajar. Meskipun demikian, dalam pelaksanaannya seringkali dihiraukan, bahkan masih banyak kegiatan pembelajaran yang hanya sekedar dilaksanakan,

tanpa memperhatikan apakah kegiatan tersebut dapat mengembangkan kreativitas dan aktivitas belajar peserta didik. Misalnya, dalam proses pembelajaran di dalam kelas, umumnya guru akan menekankan pada aspek kognitif tanpa memperhatikan kemampuan mental yang mungkin dapat menjadi landasan bagi peserta didik untuk memperoleh pengetahuan dan meningkatkan daya ingat. Kondisi seperti ini seringkali terjadi, seperti ketika seorang guru hanya berfokus pada satu topik pembahasan tanpa menghiraukan pembahasan menarik bagi para peserta didik. Pada akhirnya kreativitas peserta didik cenderung terhambat dan tidak berkembang secara optimal.

Oleh karenanya, setiap organisasi sekolah perlu memenuhi komponen mutu pembelajaran. Adapun komponen yang dimaksud adalah:

1. Kesiapan serta motivasi belajar peserta didik;
2. Kemampuan guru sebagai seorang yang profesional dan kerjasama yang baik dalam organisasi sekolah;
3. Kurikulum yang diampu organisasi pendidikan harus meliputi relevansi dengan isi serta operasional proses pembelajaran;
4. Sarana dan prasarana pembelajaran harus dapat memenuhi kecukupan dan keefektifan dalam mendukung proses belajar mengajar; dan
5. Adanya partisipasi aktif dari masyarakat (baik orang tua, alumni, dan organisasi pendidikan itu sendiri), khususnya dalam mengembangkan program pendidikan di sekolah.

Lebih dari itu, guru sebagai aspek kunci dalam proses belajar belajar juga harus mampu menciptakan situasi belajar yang kondusif, serta mengarah pada pembelajaran yang membuat peserta didik dapat berperan aktif, misalnya dengan menggunakan metode tanya jawab, sehingga dapat merangsang peserta didik untuk berpikir secara aktif, selain itu, metode tersebut juga dapat menciptakan situasi belajar yang menyenangkan dan tidak tegang meskipun topik atau materi pembelajaran yang sedang dipaparkan memiliki tingkat kesulitan yang tinggi. Lebih lanjut, untuk melihat apakah proses pembelajaran tersebut dapat dikatakan bermutu, organisasi pendidikan dapat melakukan evaluasi berdasarkan beberapa hal berikut: a) relevansi pembelajaran, yaitu kondisi ketika kegiatan pembelajaran dengan materi pada bidang studi tertentu sesuai disampaikan oleh guru; b) daya tarik yang diupayakan oleh guru dalam mencuri perhatian peserta didik untuk mengikuti proses pembelajaran; c) efektifitas sebagai bentuk ketercapaian tujuan pembelajaran yang mampu ditempu oleh peserta didik yang dilihat melalui tingkat pemahaman terhadap materi yang disampaikan; d) efisiensi adalah tolak ukur yang perlu diperhatikan dalam proses penyelesaian kegiatan pembelajaran sesuai dengan waktu yang disediakan; dan e) produktivitas pembelajaran adalah wadah yang disediakan oleh guru terhadap peserta didik agar bisa berperan aktif dalam proses pembelajaran (Prasetya & Harjanto, 2020, p.190).

Berlandaskan penjelasan tersebut, maka guru harus bisa mengembangkan berbagai macam jenis aktivitas, kreativitas, pengembangan modul yang disesuaikan dengan perkembangan

teknologi dan informasi, pengembangan berbagai layanan serta metode, sehingga dapat menciptakan istiusi belajar yang menyeyangkan, dan mengembangkan berbagai macam pendekatan dengan tujuan dapat meningkatkan mutu pembelajaran. Selain guru sebagai aspek kunci dalam pembangunan mutu pembelajaran, terdapat faktor lain yang melandasi, yaitu disiplin. Disiplin sekolah adalah sebuah konsistensi atau tindakan yang merujuk pada mematuhi segala peraturan yang sudah ditetapkan, bagi guru, staf sekolah, dan peserta didik.

Selaras dengan hal tersebut, untuk mencapai mutu yang diharapkan, maka perlu adanya usaha dalam pemenuhan beberapa aspek efisiensi eksternal pendidik meliputi beberapa faktor berikut: a) faktor manfaat atau kegunaan dari *output* pendidikan; dan b) faktor pengaruh atau *impact* dari hasil pendidikan. Lebih lanjut, Toatubun & Rijal (2018, p. 110) faktor yang dimaksud sebagai manfaat dalam hasil pendidikan terdiri dari:

1. Manfaat bagi *stakeholders* pendidikan, baik peserta didik, orang tua, masyarakat, maupun perusahaan yang menerima alumni;
2. Manfaat bagi kehidupan di masa depan, khususnya ketika seorang individu sudah memasuki dunia kerja dan pasar kerja, sehingga keluaran dari organisasi pendidikan tersebut dapat memenuhi kriteria sumber daya manusia yang siap pakai, kompeten, dan juga bermutu;
3. Manfaat bagi lembaga pendidikan sebagai bukti bahwa dapat mengeluarkan sumber daya yang bermutu; dan

4. Manfaat bagi daerah atau wilayah dengan tersedianya sumber daya manusia yang terdidik, bertakwa, dan beretika.

Sedangkan dalam faktor pengaru dari hasil lulusan merupakan suatu kondisi yang merujuk segala bentuk, pengaruh, dan konsekuensi dari *output* lulusan lembaga pendidikan terhadap a) kehidupan sosial masyarakat; b) kehidupan bermasyarakat atau kultural; c) kehidupan ekonomi; d) kehidupan dalam ranah politik baik pada tingkatan lokal maupun nasional; dan e) kehidupan keamanan maupun penjamin ketentraman masyarakat (Toatubun & Rijal, 2018, p. 111). Apabila menarik kesimpulan, dapat dianalisis bahwasanya untuk menciptakan pembelajaran yang bermutu maka terdapat cukup banyak tantangan yang harus dilalui oleh para pengelola instituti pendidikan dalam menyelenggarakan tugas, wewenang, dan tanggung jawabnya dalam meningkatkan mutu pendidikan tersebut (Toatubun & Rijal, 2018, p. 111).

Pemenuhan mutu pembelajaran ini biasanya dilakukan dengan proses yang cukup panjang dan bertahap, yaitu mulai dari tahapan yang paling rendah hingga paling tinggi. Hal tersebut tentu perlu menjadi perhatian utama, karena pembelajaran yang sebenarnya adalah sebuah proses interaksi antara peserta didik dengan guru yang terjadi di dalam suatu lingkungan yang dikelola dengan sengaja agak tujuan tertentu dapat tercapai. Dalam konteks ini, sebuah pembelajaran akan berjalan dengan baik dan bermutu apabila interaksi yang intens dengan guru dan segala aspek satu dengan lainnya berlangsung secara konsisten. Oleh karenanya, sebuah pembelajaran yang bermutu, setidaknya dilandasi oleh lima

kunci utama, yaitu 1) guru; 2) sumber dan media belajar (misalnya, buku materi dan alat praktik); 3) lingkungan; 4) peserta didik; dan 5) proses pembelajaran itu sendiri.

MANAJEMEN MUTU SEKOLAH

Manajemen dalam organisasi pendidikan merupakan salah satu aspek penting dalam menunjang perkembangan sekolah. Karena, dengan adanya manajemen, maka sekolah akan lebih efektif dan aktif dalam memberikan pendidikan yang baik bagi peserta didik (Bush & Coleman, 2012, p.15). Terlebih lagi saat ini sudah memasuki era globalisasi yang ditandai dengan adanya perkembangan teknologi dengan pesat, artinya persaingan juga semakin di dunia luar semakin ketat. Agar bisa bersaing, bahkan memenangkan dan menempatkan suatu posisi, suatu lembaga perlu meningkatkan mutu sebagai syarat atau standar dalam memenuhi ekspektasi konsumen (Firdaus, et al, 2021, p.1). Oleh karenanya, perlu ada manajemen mutu sebagai navigator dalam membantu satuan pendidikan tersebut untuk mewujudkan tujuannya. Lebih lanjut, Firdaus, et al (2021, p.2) menjelaskan bahwa manajemen mutu adalah serangkaian kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, dan pengawasan seluruh aktivitas kerja yang harus diselesaikan guna mempertahankan mutu yang diinginkan.

Salah satu praktik manajemen yang paling populer dan dijadikan landasan berpikir oleh para ahli adalah *quality management* atau QM. gerakan QM sudah dimulai sejak tahun 1950-an di Jepang, kemudian selama tahun 1980-an gerakan ini semakin populer di Amerika Serikat dan Eropa, pada akhirnya saat ini QM merupakan salah satu pembahasan utama

di sebagian besar organisasi (Ebrahimi & Sadeghi, 2013, p.5625). Seiring berjalannya waktu, QM berkembang sebagai paradigma manajemen yang dimanfaatkan untuk meningkatkan efektivitas organisasi dan inovasi (Ebrahimi & Sadeghi, 2013, p.5626). Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, bahwa kemajuan teknologi merupakan salah satu faktor yang melandasi upaya dalam meningkatkan kinerja agar dapat bersaing dengan seluruh dunia, lebih lanjut QM berkembang menjadi *total quality management* atau TQM sebagai alat penting bagi organisasi untuk memperbaiki diri dan mengikuti perubahan (Töremen, Karakuş, & Yasan, 2009, p.30).

Sebagai pendekatan manajemen modern, selain berhasil dimanfaatkan pada bidang lain, TQM juga dapat dimanfaatkan dalam bidang pendidikan, terutama merujuk pada peningkatan potensi siswa ke tingkat yang lebih tinggi (Töremen, Karakuş, & Yasan, 2009, p.30). Dalam ranah pendidikan, TQM memiliki peng-aplikasian yang cukup luas, oleh karenanya dengan menerapkan pendekatan manajemen ini, maka peningkatan sekolah telah menjadi proses berkelanjutan yang telah menciptakan lingkungan yang bercirikan persatuan, perubahan, dan kepercayaan (Terry, 1996 dalam (Töremen, Karakuş, & Yasan, 2009, p.30). Lebih lanjut, TQM di sekolah dapat memberikan pandangan untuk melihat hambatan yang dihadapi sekolah secara efektif, dan memberikan masukan bagaimana langkah yang tepat dalam menghilangkan hambatan tersebut.

Hal tersebut berarti mengantarkan tujuan yang diinginkan oleh manajemen sekolah, yaitu mutu sekolah. Tujuan tersebut tentu bergantung pada proses perencanaan, pengorganisasian, dan penggunaan seluruh sumber daya pendidikan. Upaya dalam mencapai tujuan akhir suatu organisasi (dalam hal ini sekolah) adalah suatu proses yang saling berkesinambungan dari satu aspek dengan aspek lainnya. Menurut Deming (dalam Lunenburg & Fred, 2010) upaya tersebut dapat dibahas melalui 14 prinsip yang dimanfaatkan oleh organisasi untuk mengembangkan sekolah, sebagai berikut:

1. ***Create constancy of purpose for improvement of product and service***, dalam konteks sekolah, tujuan sistem harus memiliki kejelasan dan dibagikan oleh semua pemangku kepentingan, meliputi anggota dewan sekolah, administrator, guru, staf pendukung, orang tua, masyarakat, dan peserta didik. Dalam memenuhi kebutuhan pelanggan (dalam hal ini adalah orang tua dan peserta didik) maka para pemangku kepentingan harus fokus dalam membangun tujuan pendidikan, yaitu dalam meningkatkan mutu pendidikan bagi seluruh peserta didik;
2. ***Adopt the new philosophy***, implementasi prinsip ke dua Deming ini merujuk pada pemikiran ulang mengenai misi dan prioritas dari sekolah, yaitu dengan menyelaraskan tujuan dan sudut pandang setiap elemen yang berkontribusi di dalamnya. Metode materi dan lingan yang ada dapat diganti dengan strategi mengajar dan pembelajaran baru (menyesuaikan dengan perkembangan teknologi dan informasi), dengan memfokuskannya pada

satu tujuan, yaitu meningkatkan keberhasilan peserta didik;

3. ***Cease dependence on inspection to achieve quality***, inti yang ingin disampaikan oleh Deming adalah perihal biaya, yakni biaya yang dikeluarkan untuk memperbaiki suatu masalah akan lebih tinggi daripada biaya untuk mencegahnya. Ketergantungan yang dimaksud disini merujuk pada remediasi yang dapat dihindari apabila intervensi yang tepat terjadi selama pengajaran, sehingga dapat membantu peserta didik untuk menghindari masalah belajar di kemudian hari;
4. ***End the practice of awarding business on the basis of price alone***. Berbicara mengenai praktik bisnis, maka sekolah juga perlu bergerak menuju pemasok tunggal untuk satu waktu guna mengembangkan hubungan loyalitas serta kepercayaan jangka panjang;
5. ***Improve constantly and forever every activity in the organization, to improve quality and productivity***. Deming berfokus pada proses belajar mengajar. Berdasarkan hasil temuan terbaru, diketahui bahwa strategi untuk menaiki mutu sekolah harus diupayakan, dievaluasi, dan disempurnakan sesuai dengan kebutuhan dan konsisten dengan gaya belajar. Atau dapat dikatakan juga bahwa pendidik harus mendesain ulang sistem untuk menyediakan wadah bagi peserta didik yang memiliki keistimewaan agar mendapatkan haknya dalam mendapatkan pendidikan;
6. ***Institute training on the job***. Aspek ini merujuk pada wadah yang disediakan untuk setiap pendidik, yang mana

Demin membaginya ke dalam tiga bagian, yaitu 1) harus ada pelatihan proses belajar mengajar yang menyesuaikan perkembangan zaman; 2) pelatihan juga harus disertai dengan penggunaan strategi penilaian terbaru; dan 3) harus ada pelatihan tentang prinsip sistem manajemen baru. Bagi sekolah, artinya para pemangku kepentingan perlu menyediakan wadah bagi pendidik atau guru dalam mengembangkan profesionalitas berkelanjutan untuk semua elemen pendukung pendidikan (meliputi administrator sekolah, guru, dan tenaga pendidik);

7. ***Institute leadership.*** Perspektif yang dikemukakan oleh Deming menyerupai perspektif dari Peter Senge (2006), yaitu peningkatan sistem yang stabil berasal dari mengubah sistem itu sendiri dan hal tersebut merupakan tugas utama dari manajemen serta bukan mereka lah yang bekerja di dalam sistem. Dalam hal ini, Deming menegaskan bahwa tugas utama kepemimpinan adalah mempersempit jumlah variasi dalam sistem, namun memberikan arahan agar setiap individu dapat mencapai tujuan kesempurnaan. Khususnya di sekolah, setiap individu memiliki tujuan untuk belajar, yang artinya tugas lembaga juga harus bisa menghilangkan kesenjangan bagi seluruh populasi dan menciptakan gerakan menuju keunggulan dan kesetaraan;
8. ***Drive out fear,*** landasan pemikiran dari TQM adalah setiap individu ingin melakukan yang terbaik. Selaras dengan hal tersebut, maka fokus dalam manajemen mutu sekolah harus berfokus pada upaya perbaikan, kemudian pada proses dan hasil, bukan mencoba menyalahkan seorang

individu atas kegagalan yang ia terima. Menurut Deming mutu tidak terlihat, maka dinyatakan ada kesalahan pada sistem. Mengapa? Karena penjaminan mutu adalah tugas dari manajemen untuk memungkinkan seseorang melakukan tugasnya dengan baik dengan meningkatkan sistem di tempat mereka bekerja. Seperti di sekolah, pengajar dan staf seringkali merasa takut untuk memperlihatkan masalah, karena mereka takut disalahkan;

9. *Break down barriers among staff areas.* Prinsip ke-9 yang dikemukakan oleh Daeming memiliki sedikit hubungan dengan prinsip ke-1, yaitu menciptakan keteguhan tujuan untuk meningkatkan produk dan layanan. Apabila melihat konteks di dalam kelas, prinsip ini berlaku untuk pengajaran interdisipliner, pengajaran tim, penulisan lintas kurikulum, dan transfer pembelajaran. Kemudian, apa yang dimaksud dengan penghalang? Di dalam merancang aspek-aspek yang sudah di sebutkan sebelumnya perlu ada kolaborasi antara anggota organisasi, hal tersebut tentu ditujukan agar mutu total dalam perencanaan pembelajaran dapat dimaksimalkan;

10. *Eliminate slogans, exhortations, and targets that demand zero defects and new levels of productivity,* kadang kala, terdapat makna tersirat yang terkandung di dalam sebuah slogan, seperti staf harus memiliki kinerja lebih baik apabila mereka juga bekerja lebih keras, pada akhirnya makna tersirat tersebut dapat menyinggung perasaan daripada menginspirasi seluruh anggota. Oleh karenanya, sistem manajemen perlu menciptakan

hubungan yang sehat untuk menghindari rendahnya mutu dan produktivitas di sekolah;

11. *Eliminate numerical quotas for the staff and goals for management.* Berkaitan dengan prinsip ini, terdapat cukup banyak praktik dalam pendidikan yang dinilai membatasi kemampuan seorang individu untuk memanfaatkan motivasi intrinsik dan selalu keliru dalam memahami manfaat dari imbalan ekstinsik. Hal tersebut meliputi sistem evaluasi guru yang ketat dan sistematis, pembayaran prestasi, manajemen yang berdasarkan tujuan, nilai, dan tujuan serta kuota kuantitatif. Namun, menurut Deming, prinsip tersebut adalah pola pikir yang dapat menghancurkan sistem manajemen, karena dinilai kontraduktif dengan beberapa hal, seperti dalam menetapkan tujuan cenderung mengarah pada kinerja marjinal; bayaran pantas menghancurkan kerja sama tim; dan melihat penilaian kinerja individu sebagai suatu hal yang ditakuti dan meningkatkan variabilitas dalam kinerja yang diinginkan;

12. *Remove barriers that rob people of pride in their work. Remove the barriers that rob people in leadership of their right to pride in their work.* Sebagian besar orang ingin melakukan pekerjaan dengan baik. Namun, perlu diperhatikan juga bahwa komunikasi yang efektif dan menghapus “de-motivator” merupakan salah satu aspek penting yang harus diperhatikan;

13. *Institute a vigorous program of education and retraining for everyone.* Kepala sekolah dan staf harus dilatih kembali dalam metode manajemen yang baru, tentu

berbasis sekolah, termasuk didalamnya dinamika kelompok, pembangunan konsensus, dan gaya pengambilan keputusan; dan

- 14. *Put everyone in the organization to work to accomplish the transformation.*** Artinya, dewan sekolah dan pengawas harus memiliki rencana aksi yang jelas untuk menjalankan misi mutu. Namun, perlu diperhatikan pula bahwasanya misi mutu harus diinternalisasi oleh seluruh anggota organisasi sekolah (baik anggota dewan sekolah, administrator, guru, tenaga pendidik, peserta didik, orang tua, dan masyarakat).

IKLIM SEKOLAH

A. Definisi Iklim Sekolah

Mendefinisikan iklim sekolah merupakan salah satu tantangan, bahkan sebagian besar literatur merepresentasikan perbedaannya dan telah didokumentasikan dengan baik, mulai dari definisi afektif hingga kontekstual serta dilihat secara objektif maupun subjektif (Zullig, Koopman, Patton, & Ubbes, 2010, p.139). Rovai, Wighting, & Liu (2005, p.363) mengutip penjelasan ahli mengenai iklim sekolah, yakni merujuk pada penjelasan Tagiuri (1968) iklim sekolah merupakan representasi dari mutu total di dalam lingkungan sekolah, sedangkan menurut Hoy dan Miskel (1987) iklim sekolah merupakan sekumpulan karakteristik internal yang dapat membedakan satu sekolah dengan sekolah lainnya, yang pada akhirnya hal ini dapat mempengaruhi perilaku seorang individu. Iklim sekolah sendiri terdiri dari berbagai aspek lingkungan sekolah yang secara sadar dirasakan oleh anggota sekolah (Rovai, Wighting, & Liu, 2005, p.363). Beberapa pendidik, merasa bahwa iklim sekolah mencerminkan kepribadian sekolah. Namun, iklim sekolah tentu dapat berubah berdasarkan kebijakan sekolah dan pengalaman interpersonal siswa dengan teman sebaya, instruktur, dan administrator sekolah.

Seperti halnya ilustrasi berikut, Pak Hasan merupakan seorang guru bahasa Indonesia dan saat ini hendak mengajar di kelas 6 B. Ketika Pak Hasan telah memasuki kelas, para peserta

didik tidak berada di tempat duduknya masing-masing, bahkan mereka berteriak dan tampak tidak dapat dikendalikan. Setelah menyaksikan kondisi dan suasana seperti itu, pak Hasan tidak langsung memulai proses belajar mengajarnya, melainkan ia meminta secara sopan kepada peserta didik untuk membersihkan dan merapihkan kelas, setelah itu ia memberikan nasihat agar para peserta didik untuk tidak berteriak dan kurang terkendali. Setelah itu, kurang lebih selama 30 menit pak Hasan dapat mengendalikan kelas dan kembali menjadi kondusif, akhirnya pak Hasan dapat menyelesaikan proses belajar mengajar dengan tepat waktu, meskipun terdapat beberapa materi ajar yang tidak dapat disampaikan.

Merujuk pada ilustrasi sebelumnya, apabila dilihat secara sepintas, maka tidak ada hal yang perlu dikhawatirkan kecuali adanya kekurangan jam mengajar akibat ketidak kondusifan suasana kelas. Namun, ketika berusaha untuk melihat lebih jauh, maka akan ada beberapa hal yang dapat dipelajari, seperti ketika hal tersebut terjadi secara berulang, maka akan dapat dipastikan bahwa sekolah secara tidak langsung memberikan pengalaman nyata kepada peserta didik mengenai budaya dan iklim sekolah yang tidak kondusif. Mengapa? Karena iklim sekolah yang positif maka akan melahirkan peserta didik yang dapat memenuhi hasil kognitif dan afekti, namun ketika iklim sekolah tidak baik, maka akan berdampak sebaliknya. Hal tersebut kemudian ditegaskan kembali oleh *The National School Climate Council* (2007 dalam Thapa, Cohen, Guffey, & Higgins-D'Alessandro, 2013, p.358) bahwa iklim sekolah dilandasi pada pola pengalaman

masyarakat mengenai kehidupan sekolah dan hal tersebut tentu akan menjadi cerminan terhadap norma, tujuan, nilai, hubungan interpersonal, praktik belajar mengajar, dan struktur organisasi. Dengan begitu, iklim sekolah yang positif dan berkelanjutan akan mendorong pengembangan serta pembelajaran pemuda yang diperlukan untuk kehidupan yang produktif, kontributif, dan memuaskan dalam masyarakat demokratis (Thapa, Cohen, Guffey, & Higgins-D'Alessandro, 2013, p.358).

Pada dasarnya, iklim sekolah mencakup norma, nilai, dan harapan yang mendukung seorang individu untuk merasa aman baik secara sosial, emosional, maupun fisik (Thapa, Cohen, Guffey, & Higgins-D'Alessandro, 2013, p.358). Oleh karenanya, setiap orang yang ada di dalam lingkungan tersebut, harus memberikan kontribusi untuk operasi dan perawatan lingkungan, namun perlu dipahami bahwa iklim sekolah lebih dari pengalaman individu, karena iklim sekolah merupakan fenomena kelompok yang lebih besar daripada pengalaman seseorang (Cohen, McCabe, Michelli, & Pickeral, 2009, p.182). Atau dapat dijelaskan juga bahwa iklim sekolah merupakan suatu kondisi yang merepresentasikan aspek lingkungan sekolah yang menjadi tempat bagi mereka yang terlibat di dalamnya untuk bekerja sesuai dengan peran dan tugasnya masing-masing. Lingkungan tersebut dapat berbentuk fisik maupun psikologis dan/atau sosial.

Berdasarkan beberapa penjelasan sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa pendefinisian iklim sekolah sangat beragam, belum lagi model kausal, definisi, dan taksonomi dari iklim sekolah yang juga berlimpah. Oleh karenanya, dapat

dikatakan bahwa iklim ini tidak bisa dilihat maupun disentuh, tetapi ia berada di udara dalam ruangan. Karena iklim akan mengitari dan mempengaruhi segala hal yang terjadi dalam suatu organisasi. Iklim dalam di dalam sekolah dapat mempengaruhi motivasi, prestasi dan kepuasan kerja. Atau dengan adanya iklim sekolah, artinya terdapat bukti bahwa elemen yang tergabung di dalamnya telah berkontribusi secara besar-besaran terhadap pencapaian hasil akademik peserta didik, tidak berhenti sampai disana, hal tersebut juga dapat membuktikan adanya faktor yang memberikan pengaruh kuat, yaitu komitmen guru yang tinggi, norma hubungan kelompok sebaya yang positif, kerjasama team, ekspektasi yang tinggi dari para guru dan administrator (tenaga pendidik), konsistensi dan pengaturan mengenai hukuman bagi siapapun yang melanggar peraturan, proses pembuatan kurikulum dan pembelajaran, dan kejelasan tujuan, merupakan aspek yang diperhatikan dalam iklim sekolah agar sasaran atau tujuan dalam organisasi sekolah tercapai, yaitu pencapaian hasil akademik peserta didik. Singkatnya, iklim sekolah akan terbentuk secara positif apabila terdapat komunikasi yang efektif antara guru dengan peserta didik secara mutualistik. Terlebih lagi, guru yang memiliki rasa interest, peduli, adil, dan demokratis terhadap para peserta didik ternyata mampu mengurangi angka tinggal kelas dan perilaku delinkuensi.

B. Faktor yang Membentuk/Mempengaruhi Iklim Sekolah

Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, bahwa iklim sekolah merupakan salah pendefinisian yang luas dan mengacu pada sudut pandang mengenai lingkungan kerja, khususnya

sekolah secara umum. Berbicara terkait faktor yang mempengaruhi iklim sekolah, menurut Grayson & Alvarez (2008, p.1359) bahwa terdapat beberapa aspek yang sangat melekat, yakni a) jumlah aturan yang digambarkan secara jelas bagi seluruh peserta didik di sekolah; b) tingkat waktu kelas yang dikhususkan untuk kegiatan belajar mengajar; dan c) tingkat interupsi dari pihak eksternal. Mengapa hal tersebut menjadi penting dalam pembentukan atau dapat mempengaruhi iklim sekolah? Karena secara dengan memperhatikan tiga aspek tersebut, maka secara tidak langsung para pemangku kepentingan yang tergabung di dalam organisasi sekolah juga memperhatikan peningkatan nilai sekolah dengan menempatkan jumlah waktu yang berkualitas, khususnya untuk pekerjaan kelas dan kegiatan belajar, serta meminimalisir interupsi yang akan terjadi karena tugas administratif atau gangguan dari pihak eksternal. Pada akhirnya, hal tersebut akan menciptakan perasaan keberhasilan dan pencapaian pribadi seorang guru yang juga dapat dinilai sebagai peningkatan yang positif.

Selaras dengan penjelasan sebelumnya, Beycioglu dan Aslan (2010 dalam Kilinç, 2014, p.1731) bahwa terdapa tiga komponen potensial yang membuat kepemimpinan guru berkaitan dalam membentuk dan/atau memempengaruhi iklim sekolah, yaitu peningkatan kelembagaan, peningkatan profesional, dan kolaborasi yang baik antar rekan kerja. Pernaikan kelembagaan merupakan kondisi ketika setiap guru dapat berkontribusi secara efektif untuk memperbaiki lingkungan belajar dan mengajar di lingkungan sekolah, hal tersebut dapat terjadi apabila setiap guru berperan aktif dalam

mengambil peran kepemimpinan tambahan, seperti memimpin tim atau menjadi perwakilan sekolah. Kemudian, untuk peningkatan profesional ini berhubungan dengan upaya guru dalam membantu meningkatkan keterampilan teman sejawat. Dengan begitu, pemimpin guru juga diharapkan bisa merancang praktik kelas yang inovatif, sehingga dapat melayani berbagai macam kebutuhan belajar peserta didik. Pada akhirnya, peningkatan profesionalitas akan dianggap sebagai salah satu aspek penting dan tanggung jawab utama bagi setiap guru. Gronn (2000 dalam Kilinç, 2014, p.1731) menegaskan kembali, bahwasanya, peningkatan mutu sekolah sangat bergantung pada guru yang secara terus menerus meningkatkan keterampilannya, baik ketika mengajar dan ketika memperluas ilmu pengetahuan untuk dirinya.

Memperluas ilmu pengetahuan tentu berhubungan dengan berbagai aspek, Rudasill, Snyder, Levinson, & L Adelson (2018, p.46) dalam tulisannya menjelaskan bahwa interaksi dan hubungan sosial, rasa aman fisik dan sosial-emosional, dan nilai-nilai serta kepercayaan yang dipegang oleh peserta didik, guru, administrator, dan/atau staf yang tergabung di dalamnya memiliki kaitan yang erat dalam peningkatan atau sebagai landasan berjalannya iklim sekolah. Faktor ini secara terperinci dikemukakan oleh Rudasill, Snyder, Levinson, & L Adelson (2018, p.37) dalam tabel sebagai berikut:

Table 1 Themes in school climate models

Model	Physical environment	Teaching and instruction	Safety and discipline	Leadership	Relationships	Shared beliefs
Anderson (1982) <i>Literature synthesis</i>	Physical and material variables in the school		Patterns and rules of interacting	Patterns and rules of operating	Social system through patterns and rules of interacting	Norms, belief systems, values; cognitive structures; meanings of persons
Hoy (1990); Hoy and Hannum (1997) <i>Organizational effectiveness tradition</i>				Collegial leadership; resource support; principal influence	Family and community; institutional integrity; teacher affiliation	Academic emphases
Haynes et al. (1993) <i>School effectiveness tradition</i>	Shared resources; school building appearance		Order and discipline	Collaborative decision-making; principal caring and sensitivity	Parent involvement; parent, community, school relationships; student interpersonal and student-teacher relationships	Fairness; achievement motivation and focus; dedication to student learning; staff focus
Creemers and Keeigt (1999) <i>School effectiveness tradition</i>	School building appearance and maintenance	Expectations for teacher behavior and student outcomes	Orderly environment		Social interactions	
Cohen et al. (2009) <i>Literature synthesis</i>		Data-driven decision making; professional development	Physical safety; socio-emotional safety	Vision, accessibility, and support	School and community collaboration; respect for diversity	Morale and connectedness
Tkapa et al. (2013) <i>Literature synthesis</i>	Physical layout and surroundings; resources and supplies	Norms, goals, and values for teaching and learning; social, emotional, civic; ethical education	Safety, rules and norms		Student interpersonal relationships and student-teacher relationships	Connectedness and engagement

Sumber: Rudasill, Snyder, Levinson, & L Adelson (2018, p.37)

Berdasarkan tabel tersebut, dapat disimpulkan bahwa interaksi sosial yang terjadi diantara individu dan kelompok di sekolah, serta proses sosial yang terbentuk merupakan

landasan dari pembentukan iklim sekolah. Selain itu, rasa percaya, kerjasama, dan keterbukaan terhadap interaksi antara guru dan/atau antara guru dengan peserta didik merupakan salah satu contoh interaksi yang terbangun secara positif dalam iklim sekolah. Kondisi ini dapat dinilai melalui sejauh mana dukungan dan dorongan diberikan kepada peserta didik, baik sesama peserta didik atau guru lain, administrator, dan staf di berbagai kelompok peserta didik, hal tersebut juga dapat merepresentasikan tingkat kesertaraan dalam iklim sekolah sebagai proses sosial. Selain itu, budaya teman sebaya di dalam lingkungan sekolah juga termasuk ke dalam inti dari proses sosial, hal tersebut dilihat melalui integrasi atau inklusi sosial, atau melalui penolakan dan intimidasi. Dengan adanya pengalaman tersebut, maka mereka akan berkembang di dalam maupun di antara semua kelompok yang terlibat di dalam lingkungan sekolah, bahkan pengalaman tersebut juga dapat menjadi kekuatan dan meningkatkan mutu hubungan ketika para peserta didik merasa dirinya berkontribusi.

Meskipun demikian, terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan mengenai faktor pendukung iklim sekolah ini, bahwa keyakinan dan nilai bersama merupakan komponen terakhir yang perlu diperhatikan. Keyakinan sendiri berakar dari persepsi pengalaman, seperti halnya karakter intruksi di beberapa ruang kelas. Serangkaian keyakinan ini utamanya berputar pada aturan, keamanan, dan disiplin. Oleh karenanya perlu kontribusi yang baik antara guru dan peserta didik dalam mengembangkan rasa kejelasan dan keadilan aturan, sehingga peserta didik pun dapat membentuk pendapat tentang efektivitas serta kesertaraan dalam penerapan disiplin. Pada

akhirnya, nilai bersama akan mencakup ekspektasi keberhasilan seluruh peserta didik, komitmen untuk melindungi waktu akademik, dan penekanan akademik yang dirasa secara konsisten pada kelas dan kelompok peserta didik.

C. Peran Iklim Sekolah dalam Pencapaian Mutu Sekolah

Apabila merujuk pada berbagai hasil penelitian mengenai iklim sekolah, dapat diketahui bahwa iklim sekolah memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap berbagai sektor dan individu di dalam sekolah. Terlebih lagi, sebagian besar pengukuran iklim sekolah adalah instrumen survei yang harus diselesaikan oleh guru, peserta didik, dan administrasi sekolah (Roach & Kratochwill, 2004, p.11). Instrumen tersebut tentu berhubungan erat dengan penjelasan sebelumnya, bahwa persepsi peserta didik mengenai keterhubungan, kepercayaan, dan saling ketergantungan dapat memediasi hubungan antara praktik sosialisasi budaya sekolah dan keterlibatan sekolah pada aktivitas sehari-hari (Del Toro & Wang, 2021, p.2). Singkatnya, iklim sekolah yang secara khusus dibahas disini adalah hubungan antara guru dengan peserta didik, interaksi antara peserta didik satu dengan lainnya, rasa memiliki sekolah, dan kepercayaan dalam praktik disiplin yang adil. Selain itu, sekolah yang mempromosikan keragaman budaya dan kebanggaan etnis-rasial memiliki kemungkinan yang cukup besar juga dalam menyediakan lingkungan yang mendukung suasana kondusif pada proses belajar, khususnya dalam menghargai latar belakang setiap elemen yang berada di dalam lingkungan sekolah, baik berbeda secara etnis-ras dan budaya. Dengan begitu, setiap peserta didik akan menghargai

keberadaan perbedaan dan organisasi sekolah dapat meminimalisir pengucilan sosial serta dapat menjadi wadah dalam interaksi lintas kelompok.

Demikian pula, keterlibatan dalam praktik sosialisasi budaya dapat mengurangi bias dan prasangka bagi pendidik itu sendiri. Oleh karenanya, pendidik mungkin akan memiliki hubungan yang lebih baik dengan peserta didik dan dapat menciptakan praktik disiplin yang lebih adil. Singkatnya, dalam beberapa penelitian menunjukkan bahwa sosialisasi budaya sekolah tentang iklim sekolah yang positif memiliki hubungan yang cukup erat dengan keterlibatan peserta didik di dalam lingkungan sekolah. Peran iklim sekolah dalam menaikkan mutu sekolah dapat dilihat dari hasil penelitian yang secara khusus mencermati hubungan antara sosialisasi budaya sekolah dengan iklim sekolah. Berdasarkan hasil penelitian tersebut, dapat diketahui bahwa remaja yang menerima pesan sosialisasi budaya dari pendidik dengan baik, mereka akan memiliki pandangan yang lebih baik terhadap guru mereka. Selain itu, keterlibatan peserta didik dalam kegiatan di sekolah juga cenderung lebih aktif. Kemudian, para peserta didik jadi memahami bahwasanya peraturan yang ditegakkan secara jelas dan konsisten harus dipatuhi. Bahkan, beberapa penelitian juga mengatakan bahwa para peserta didik memiliki hubungan interpersonal yang lebih kuat di sekolah. Hubungan interpersonal ini tentu mengacu pada hal yang positif, oleh karenanya timbul kepercayaan peserta didik terhadap keterlibatan otoritas sekolah dalam praktik disiplin yang adil.

D. Dimensi Iklim Sekolah

Pada dasarnya, lingkungan sekolah sangat beragam. Namun, terdapat beberapa sekolah yang mengedepankan kondisi lingkungan sekolah yang ramah dan mendukung, namun terdapat sekolah lain juga yang terkadang malah menciptakan kondisi lingkungan yang sebaliknya, yaitu membuat peserta didik atau elemen yang tergabung didalamnya merasa dikucilkan, tidak ramah, dan bahkan tidak ada rasa aman yang tercipta (Loukas, 2007). Meskipun terdapat cukup banyak pendefinisian mengenai iklim sekolah, menurut Loukas (2007) beberapa penelitian setuju bahwa dimensi dari iklim sekolah terdiri dari, fimensi fisik, sosial, dan akademik.

Dimensi fisik meliputi lima hal sebagai berikut:

- Penampilan gedung sekolah dan ruang kelas;
- Ukuran sekolah serta rasio peserta didik terhadap guru di kelas;
- Order dan organisasi ruang kelas di sekolah;
- Ketersediaan sumber daya; dan
- Keamanan dan kenyamanan

Dimensi sosial meliputi empat aspek, yaitu:

- Kualitas dari hubungan interpersonal yang terjalin antara peserta didik, guru, staf, dan administrator;
- Adanya perlakuan yang adil terhadap peserta didik oleh guru dan staf;
- Tingkat persaingan dan perbandingan sosial diantara peserta didik; dan

- Se jauh mana siswa, guru, dan staf dapat berkontribusi dalam pengambilan keputusan di sekolah.

Dimensi akademik terdiri dari 3 aspek, yaitu:

- Kualitas pengajaran;
- Harapan guru terhadap prestasi peserta didik; dan
- Memantau kemajuan siswa dan segera melaporkan hasil kepada peserta didik dan orang tua.

E. Mutu dalam Konteks Administrasi Pendidikan

Kualitas merupakan konsep yang sulit dipahami di sebagian besar layanan, khususnya terjadi dalam layanan publik di yang memiliki keanekaragaman pelanggan dan pemangku kepentingan yang terlibat. Berdasarkan hal tersebut, maka akan terbentuk perbedaan yang secara signifikan dalam menentukan persepsi kualitas yang menjadi faktor terjalannya hubungan antara pelanggan dengan organisasi baik secara internal maupun eksternal (Galloway, 1998, p.20). Oleh karenanya, mutu layanan administrasi dalam beberapa penelitian dikatakan memiliki kepentingan yang sama dengan penilaian kualitas layanan secara keseluruhan dalam konteks pendidikan (Sultan & Yin Wong, 2013, p.77). Mutu yang berkaitan dengan layanan administrasi menurut Sultan & Yin Wong (2013, p.77) mengacu pada atribut layanan yang memberikan layanan pendukung untuk kelancaran kegiatan akademik. Kemungkinan, mutu tersebut diharapkan ada dan diterapkan oleh setiap staf administrasi, sehingga dapat meminimalisir kekurangan selama proses pelayanan administrasi, hal tersebut tentu dapat mengakibatkan evaluasi

atau penilaian yang buruk terhadap mutu pelayanan secara keseluruhan. Penjelasan tersebut dapat melandasi argumentasi bahwa terdapat cukup banyak aspek dari usaha penyelenggaraan pendidikan, yang harus tercakup dalam sebuah rancangan pendidikan, khususnya yang memiliki kedudukan strategik dalam pelaksanaan proses manajerial pendidikan, sehingga pada akhirnya dapat meningkatkan mutu pendidikan tersebut.

Guna meningkatkan mutu pendidikan, Oteng Sutrisna (1989 dalam Hadijaya, 2012, p.10) menjelaskan bahwa administrasi pendidikan harus meliputi beberapa hal sebagai berikut:

- Latar belakang administrasi pendidikan (meliputi geografi, kependudukan, ekonomi, proses pembangunan, kebudayaan, dan ideologi);
- Bidang garapannya (fokus utama dalam pendidiran organsisasi pendidikan tersebut); dan
- Harus mencakup unsur pokok administrasi, seperti tugas, proses, asas, dan perilaku administrasi guna memberikan gambaran mengenai administrasi pendidikan memiliki cakupan yang luas dan saling berhubungan satu dengan yang lainnya.

Lebih lanjut, Hadijaya (2012, p.11) menjelaskan bahwa ruang lingkup administrasi pendidikan umumnya meliputi sumber daya manusia, kurikulum, proses belajar mengajar, sarana atau prasarana, dan dana yang diperlukan untuk mengembangkan tujuan pendidikan. Untuk meningkatkan mutu, administrasi pendidikan hendaknya juga memenuhi

syarat berikut, 1) memiliki kegiatan atau kerjasama yang dilakukan bersama dengan organisasi tertentu; 2) adanya penata atau pengaturan dalam kerjasama; dan 3) memiliki tujuan yang akan dicapai dari kegiatan kerja sama itu sendiri. Kemudian, perlu dipahami bahwa ketiga syarat tersebut harus berjalan secara berdampingan, apabila salah satu tidak ada, maka tidak akan bisa dikatakan sebagai administrasi. Mengapa demikian? Karena administrasi pendidikan sendiri sesungguhnya kaidah administrasi dalam bidang pendidikan atau sebuah kegiatan yang meliputi pengarahan, pengawasan, dan pengelolaan sumber daya yang berhubungan dengan pendidikan atau sekolah dan/atau untuk mencapai tujuan pendidikan.

Mutu pendidikan bukanlah sesuatu yang dapat tercipta secara tiba-tiba, melainkan hasil dari suatu proses pendidikan, apabila proses tersebut berjalan dengan baik, efektif dan efisien, maka peluang untuk mendapatkan hasil mutu pendidikan yang baik akan terbuka sangat lebar. Mutu pendidikan juga memiliki kontinum dari rendah ke tinggi, sehingga akan berkedudukan sebagai suatu variabel. Variabel dalam hal ini dilandasi oleh beberapa faktor, seperti kepemimpinan, iklim organisasi, kualifikasi guru, anggaran, dan tercukupinya fasilitas belajar mengajar. Atau dapat dijelaskan juga bahwa terdapat cukup banyak komponen yang harus dikelola dengan baik untuk mewujudkan mutu pendidikan. Atau dapat dikatakan juga bahwa administrasi pendidikan dapat melahirkan serta menentukan mutu proses maupun hasil akhir dari pendidikan tersebut. Untuk itu, setiap elemen yang tergabung di dalam administrasi sekolah, harus

memperhatikan enam bidang yang disebutkan oleh Hidayat (2014), khususnya untuk menaikkan mutu administrasi dalam pendidikan, yaitu:

- Bidang akademik, dalam hal ini, para tenaga administrasi sekolah memiliki peran dalam pengadaan, penyampulan, dan penjilidan prota serta promes. Selain itu, tenaga administrasi juga berperan dalam pengetikan maupun pembagian jadwal belajar mengajar untuk guru dan peserta didik, merancang model satuan pembelajaran, norma kenaikan kelas, serta pelaksanaan evaluasi belajar siswa, bahkan tenaga administrasi juga memiliki wewenang untuk membuat surat keluar guru apabila memiliki tugas luar atau mengikuti kegiatan diklat. Kemudian, di akhir semester tenaga administrasi juga berperan dalam merekap nilai ulangan harian, tugas, maupun ujian akhir semester;
- Bidang kesiswaan. Pada bidang ini, setiap tenaga administrasi sekolah memiliki tugas dalam mengatur pelaksanaan beberapa kegiatan yang berhubungan dengan peserta didik, baik mengatur proses penerimaan peserta didik baru, mengelola layanan bimbingan dan konseling, dan mengelola absensi peserta didik hingga mengelola kegiatan ekstrakurikuler. Singkatnya, tugas tenaga administrasi terbagi menjadi tiga, yaitu identitas, hasil belajar, dan kehadiran peserta didik;
- Bidang personalia merujuk pada setiap kegiatan yang ditujukan untuk meringankan beban guru atau karyawan dalam melengkapi data dan surat yang diperlukan untuk mengusulkan kenaikan pangkat maupun mutasi;

- Bidang keuangan, seperti pada umumnya di setiap organisasi pasti memiliki struktur keuangan. Begitu pula di dalam administrasi sekolah, dalam bidang keuangan, para tenaga administrasi berperan dalam menyiapkan rencana anggaran dan belanja sekolah serta menyertakan hasil;
- Bidang sarana dan prasarana adalah peran tenaga administrasi dalam melengkapi maupun menyediakan ATK yang dibutuhkan oleh perpustakaan. Tidak hanya itu, tenaga administrasi dalam bidang ini juga harus dapat menyimpan alat peraga, mendata peminjaman alat pembelajaran, hingga melakukan perawatan alat maupun perbaikan. Atau singkatnya, tenaga administrasi dalam bidang sarana dan prasarana memiliki tanggung jawab dalam menangani keluar atau masuk peralatan atau keperluan untuk menunjang proses belajar mengajar;
- Bidang hubungan masyarakat merujuk pada kegiatan notulensi, pengaturan daftar hadir, hingga membuat serta membagikan undangan rapat bagi guru maupun orang tua peserta didik.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Bush, T., & Coleman, M. (2012). *Quality Management of Educational Leadership*. Jogjakarta: IRCiSoD.
- Chapman, D. W., & Adams, D. K. (2002). *The quality of education: Dimensions and strategies*. Hong Kong: Asian Development Bank.
- Dale, B., G. (2003). TQM: An Overview. In *Managing Quality*. (2003). Blackwell Publishing.
- Evans, J., R., & Lindsay, W., M. (2020). *Managing for Quality and Performance Excellence*. Australia: Cengage.
- Firdaus, E., et al. (2021). *Manajemen mutu pendidikan*. Yayasan Kita Menulis.
- Hadijaya, Y. (2012). *Administrasi pendidikan*. Medan: Perdana Publishing.
- Hoy, W., K., Miskel, C., G., & Tarter, C., J. (2008). *Educational Administration: Theory, Research, and Practice*. New York: Mc Graw Hill
- Hoyle, D. (2007). *Quality Management Essentials*. London: Routledge
- Mulyasana, D. (2011). *Pendidikan Bermutu dan Berdaya Saing*. Bandung: Rosda
- Sallis, E. (2012). *Total Quality Management in Education Manajemen Pendidikan*. Jogjakarta: IRCiSoD
- Toatubun, F. A., & Rijal, M. (2018). *Profesionalitas dan mutu pembelajaran*. Uwais Inspirasi Indonesia.

Artikel

- Aziz, A. (2015). Peningkatan mutu pendidikan. *Jurnal Studi Islam*, 10(2), 1-13.
- Barrett, A., et al. (2006). Review of the 'International' Literature on the Concept of Quality in Education. *Bristol, EdQual*, 1-9.
- Cheng, Y. C., & Tam, W. M. (1997). Multi-models of quality in education. *Quality assurance in Education*.
- Christianingsih, E. (2011). Manajemen Mutu Perguruan Tinggi (Studi tentang Kpemimpinan Visioner dan Kinerja Dosen terhadap Mutu Perguruan Tinggi Swasta di Kota Bandung). *Manajerial: Jurnal Manajemen dan Sistem Informasi*, 10(1), 31-41
- Cohen, J., McCabe, E. M., Michelli, N. M., & Pickeral, T. (2009). School climate: Research, policy, practice, and teacher education. *Teachers college record*, 111(1), 180-213.
- Dalyono, B., & Agustina, D. A. (2016). Guru profesional sebagai faktor penentu pendidikan bermutu. *Bangun Rekaprima: Majalah Ilmiah Pengembangan Rekayasa, Sosial dan Humaniora*
- Del Toro, J., & Wang, M. T. (2021). Longitudinal inter-relations between school cultural socialization and school engagement: *The mediating role of school climate. Learning and Instruction*, 75, 101482.
- Ebrahimi, M., & Sadeghi, M. (2013). Quality management and performance: An annotated review. *International Journal of Production Research*, 51(18), 5625-5643.

- Galloway, L. (1998). Quality perceptions of internal and external customers: a case study in educational administration. *The TQM magazine*, 10(1), 20-26.
- Gardner, K., & Mazza, D. (2012). Quality in general practice: definitions and frameworks. *Australian family physician*, 41(3), 151-154.
- Gay, M. (2016). Tugas dan Tantangan Guru: Membangun Kualitas Guru Menuju Pengembangan Pendidikan Bermutu. *EDUKASI*, 13(2).
- Grayson, J. L., & Alvarez, H. K. (2008). School climate factors relating to teacher burnout: A mediator model. *Teaching and teacher education*, 24(5), 1349-1363.
- Harvey, L., & Green, D. (1993). Defining quality. *Assessment & evaluation in higher education*, 18(1), 9-34.
- Herawan, E. (2011). Pengendalian mutu pendidikan: konsep dan aplikasi. *Jurnal Administrasi Pendidikan*, 13(1)
- Hidayat, S. P. (2014). Peran Tenaga Administrasi Sekolah Dalam Meningkatkan mutu Pelayanan Sekolah Di Man 1 Kota Mojokerto. *Inspirasi Manajemen Pendidikan*, 4(4).
- Jamali, Y. (2016). Konsep Pengendalian Mutu Pendidikan. *Tarbawy: Jurnal Pendidikan Islam*, 1, 304-318.
- Kilinç, A. Ç. (2014). Examining the Relationship between Teacher Leadership and School Climate. *Educational Sciences: Theory and Practice*, 14(5), 1729-1742.
- Koslowski III, F. A. (2006). Quality and assessment in context: A brief review. *Quality assurance in education*, 14(3), 277-288.
- Loukas, A. (2007). What is school climate. *Leadership compass*, 5(1), 1-3.

- Lunenburg, F. C., & Fred, C. (2010). Total quality management applied to schools. *Schooling*, 1(1), 1-6.
- Narasimhan, R., & Schoenherr, T. (2012). The effects of integrated supply management practices and environmental management practices on relative competitive quality advantage. *International Journal of Production Research*, 50(4), 1185-1201.
- Prasetya, T. A., & Harjanto, C. T. (2020). Pengaruh mutu pembelajaran online dan tingkat kepuasan mahasiswa terhadap hasil belajar saat pandemi Covid19. *Jurnal Pendidikan Teknologi Dan Kejuruan*, 17(2), 188-197.
- Reeves, C. A., & Bednar, D. A. (1994). Defining quality: alternatives and implications. *Academy of management Review*, 19(3), 419-445.
- Rifandi, A. (2013). Mutu pembelajaran dan kompetensi lulusan Diploma III Politeknik. *Cakrawala Pendidikan*, 5(1).
- Roach, A. T., & Kratochwill, T. R. (2004). Evaluating school climate and school culture. *Teaching exceptional children*, 37(1), 10-17.
- Rothstein, J. (2010). Teacher quality in educational production: Tracking, decay, and student achievement. *The Quarterly Journal of Economics*, 125(1), 175-214.
- Rovai, A. P., Wighting, M. J., & Liu, J. (2005). School climate. *Quarterly Review of Distance Education*, 6(4).
- Rudasill, K. M., Snyder, K. E., Levinson, H., & L Adelson, J. (2018). Systems view of school climate: A theoretical framework for research. *Educational psychology review*, 30, 35-60.

- Sauri, S. (2016). Strategi pembangunan bidang pendidikan untuk mewujudkan pendidikan bermutu. *Bandung: UPI*.
- Sultan, P., & Yin Wong, H. (2013). Antecedents and consequences of service quality in a higher education context: A qualitative research approach. *Quality assurance in education*, 21(1), 70-95.
- Thapa, A., Cohen, J., Guffey, S., & Higgins-D'Alessandro, A. (2013). A review of school climate research. *Review of educational research*, 83(3), 357-385.
- Töremen, F., Karakuş, M., & Yasan, T. (2009). Total quality management practices in Turkish primary schools. *Quality assurance in Education*, 17(1), 30-44.
- Umam, M. K. (2020). Dinamisasi Manajemen Mutu Persfektif Pendidikan Islam. *Jurnal Al-Hikmah*, 8(1), 61-74.
- Zullig, K. J., Koopman, T. M., Patton, J. M., & Ubbes, V. A. (2010). School climate: Historical review, instrument development, and school assessment. *Journal of psychoeducational assessment*, 28(2), 139-152.

Skripsi

- Sonia, G. (2021). *Analisis Penerapan dan Efektivitas Manajemen Kualitas pada UMKM Olahan Pertanian di Kota Tarakan*. Universitas Borneo Tarakan

Undang-Undang

- Indonesia. (1945). *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*
- Indonesia. (2003). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional*.

BIODATA PENULIS



DR. Yuyun Nuriah, M.Pd.

Dosen Universitas Indraprasta PGRI (UNINDRA) Jakarta

Yuyun Nuriah, Lahir Di Kuningan, 12 September 1961. Penulis menyelesaikan Pendidikan Dasar di Bojong Kuningan (Jawa Barat) dan Pendidikan Menengah Di Cilimus Kuningan, Selanjutnya ia menamatkan S-1 Fakultas Keguruan Dan Ilmu Pendidik (Dra) Di Universitas Cendrawasih (UNCEN) Papua, menamatkan S-2 Administrasi Pendidikan (M.Pd) Di UHAMKA Jakarta, penulis menamatkan S-3 Administrasi Pendidikan (DR) di UPI Bandung. Ia Memulai Karir Sebagai Guru SMEA N Sorong Papua Barat, (1987-1988), pindah ke SMEA N Jayapura Papua (1988-1995), Kepala Sekolah Menengah Negeri 09 Jayapura (1995-2000), Pengawas Pendidikan (2000-2003), Widyaiswara Papua (2003-2007) dan Widyaiswara Jakarta (2007-2020).

Pada 2005, penulis memperoleh Bea Siswa untuk menempuh Master Sarjana dari Pemerintah Indonesia dan memperoleh Gelar M.Pd, pada 2007 penulis memperoleh Bea Siswa untuk menempuh Doktorat dari Pemerintah Indonesia dan memperoleh Gelar DR. Penulis menjadi peserta dan

pembicara dalam berbagai forum seminar bidang pendidikan pada tingkat regional, dan nasional di antaranya, diklat penguatan asesor penilaian potensi kepemimpinan (2015), ToT kurikulum bagi pengawas sekolah (2015), pelatihan implementasi kurikulum 2013 jenjang SMA (2015). Capacity Building EDS/M Tahap I di Hotel Griya Astoeti (2011), Seminar Nasional Penyusunan Buku “Out Look” Pendidikan Masa Depan (2011), kegiatan Bimbingan Teknis Calon Tim Penilai Angka Kredit bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan di Bandung (2011).

Pengalaman organisasi yang lain adalah sebagai anggota PII di kuningan, sebagai bendahara HMI (1981-1988) di Jayapura-Papua, KAHMI di Jayapura, sebagai ketua BMKT di Jayapura, IPHI di Jayapura. Ketua Koordinasi Pelaksanaan Pendidikan Jarak Jauh (Kerjasama dengan PPPG Tertulis Bandung) (2003/2005), Koordinator Quality Assurance USTJ Papua (2003/2010), Dosen/ pembina yayasan Bhineka Tunggal Ika (USTJ) (2003 – 2010), Koordinator Widyaiswara LPMP DKI Jakarta (2010 /2012), Ketua PKBM YBTI Depok (2012-sekarang). Rektor Universitas Sains dan Teknologi Jayapura (USTJ) Jayapura (2014-sekarang).